

**LAPORAN AKHIR**  
**MEMETAKAN**  
**PENYANDANG DISABILITAS (PD)**  
**DI PASAR TENAGA KERJA INDONESIA**

Dilakukan oleh:

LPEM FEB UI  
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

2017

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2017  
Cetakan Pertama 2017

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [rights@ilo.org](mailto:rights@ilo.org) Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara anda.

*Laporan Akhir - Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*; /Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2017

vi; 52 p.

ISBN: 978-92-2-030686-4 (print)  
978-92-2-030687-1 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *Final Report - Mapping Persons with Disabilities (PWD) in Indonesia*; ISBN: 978-92-2-131366-3 (print); 978-92-2-131367-0 (web pdf)/Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2017

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO ([www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta)) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di [jakarta@ilo.org](mailto:jakarta@ilo.org).

Dicetak di Indonesia

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tinjauan Pustaka	3
1.2.1. Definisi Disabilitas: Perbandingan	3
1.2.2. PD dan Partisipasi di Pasar Tenaga Kerja	6
1.2.3. PD, Non-PD dan Perbedaan Upah	8
<b>BAB 2. MEMETAKAN PD DI PASAR TENAGA KERJA INDONESIA</b>	9
2.1 Potret karakteristik PD di Indonesia	9
2.2 Partisipasi PD di Pasar Tenaga Kerja	14
2.3 Membandingkan Karakteristik Sosial Demografis PD dan Non-PD di Pasar Tenaga Kerja	18
2.4 Siapa yang Mendapatkan Upah Lebih Rendah?	21
<b>BAB 3. SIAPA YANG DIPEKERJAKAN? ANALISIS FAKTOR PENENTU PROBABILITAS PD DIPEKERJAKAN</b>	25
3.1 PD Memasuki Pasar Tenaga Kerja	27
3.2 Probabilitas PD Dipekerjakan	28
3.3 PD Mana yang Dipekerjakan?	29
<b>BAB 4: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	33
<b>REFERENSI</b>	35
<b>LAMPIRAN</b>	38

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbandingan Pengukuran Disabilitas di Indonesia	5
Tabel 2. Provinsi di Sepuluh Teratas Prevalensi Disabilitas dari Lima Sumber Data Disabilitas	6
Tabel 3. Membandingkan Kondisi Sosial dan Demografi PD dan Non-PD di Indonesia	12
Tabel 4. Penyandang Disabilitas di Angkatan Kerja Indonesia	15
Tabel 5. Upah dan Jam Kerja Rata-rata	22
Tabel 6. Sebaran Pendapatan PD dan Non-PD	22
Tabel 7. Dampak Marginal Model 1 – Probabilitas PD masuk ke dalam angkatan kerja	27
Tabel 8. Dampak Marginal Model 2 – Probabilitas PD dipekerjakan (dari semua sampel)	28
Tabel 9. Dampak Marginal Model 3 – Probabilitas PD dipekerjakan (antar PD)	30

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Prevalensi Disabilitas di seluruh Provinsi	11
Gambar 2. Prevalensi Disabilitas menurut Kelompok Usia	14
Gambar 3. Status Pekerjaan	16
Gambar 4. Status Pekerjaan formal/Informal	16
Gambar 5. Status Berdasarkan Jenis Disabilitas PD	20
Gambar 6. Status Pembayaran PD seluruh usia	21
Gambar 7. Upah Bulanan dan Tingkat Pendidikan (dalam ribuan)	23
Gambar 8. Upah dan Jam Kerja Rata-rata menurut Kelompok Usia dan Status Disabilitas	24

## DAFTAR SINGKATAN

BPS	Badan Pusat Statistik
CPRD	Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
ICF	Klasifikasi Keberfungsian Internasional ( <i>International Classification of Functioning</i> )
Non-PD	Non-Penyandang Disabilitas
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD	Penyandang Disabilitas
Podes	Potensi Desa
Pusdatin	Pusat Data dan Informasi
Risikesdas	Riset Kesehatan Dasar
Sakernas	Survei Tenaga Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
ILO	Organisasi Perburuhan Internasional
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia
WHODAS	Jadwal Penilaian Disabilitas Organisasi Kesehatan Dunia



## 1.1. Latar Belakang

**LEBIH** dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk dunia adalah penyandang disabilitas (PD) dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk dalam usia kerja. Diyakini bahwa mengecualikan PD di pasar tenaga kerja akan mengurangi manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian pada masalah PD, terutama setelah perjanjian PBB tersebut berlaku pada 2008. Sejak saat itu, banyak pemerintah dan lembaga internasional mengalihkan perhatian pada tujuan mengikutsertakan mereka dalam pembangunan ekonomi.

Indonesia telah membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, setelah ratifikasi CPRD PBB melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. UU ini merevisi UU sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1997 dan bergeser dari perspektif “belas kasihan” ke perspektif “pemberdayaan” dalam melihat penyandang disabilitas. UU ini mewajibkan kita untuk melibatkan PD dalam semua aspek kehidupan – termasuk kegiatan ekonomi. Jumlah pasal di UU ini naik dari 51 menjadi 153, yang mencerminkan jaminan yang lebih baik dalam memastikan hak-hak PD.

Pesan kuat berkenaan dengan pengikutsertaan PD di pasar tenaga kerja muncul di Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 yang mewajibkan perusahaan mengakomodasi PD sekurang-kurangnya satu persen dari angkatan kerja untuk sektor swasta, dan dua persen untuk sektor publik (pemerintah dan perusahaan milik negara). Pelaksanaan pasal 53 cukup menantang mengingat status sektor ekonomi formal saat ini masih dalam tahap awal dalam melibatkan PD dan belum familiar dengan isu disabilitas menjadi hambatan bagi PD untuk memasuki sektor ekonomi formal. Dari keseluruhan lapangan pekerjaan, hanya 0,26 persen pekerja formal merupakan penyandang disabilitas berat<sup>1</sup>. Alasan lain rendahnya keterlibatan PD di pasar tenaga kerja formal adalah kurangnya infrastruktur untuk mendukung PD, misalnya akses ke tempat kerja.

---

1 Data menunjukkan angka yang menggembirakan dalam persentase PD yang dipekerjakan relatif terhadap jumlah pekerjaan: 6,23 persen. Angka tersebut jauh di atas ketentuan peraturan, 1-2 persen. Namun, analisis yang cermat adalah keharusan karena sejumlah besar PD tidak memasuki pasar kerja – mereka kehilangan semangat untuk masuk dan menjadi ‘orang tidak aktif’. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa angka tersebut didasarkan pada definisi disabilitas dalam Sakernas 2016, yang mungkin berbeda dengan yang digunakan dalam undang-undang atau yang didefinisikan oleh WHO dalam International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Hingga saat ini, kami belum banyak menemukan penelitian yang membahas keterlibatan PD dalam angkatan kerja di Indonesia. Ini sebagian karena terbatasnya data yang tersedia untuk analisis menyeluruh mengenai kondisi PD di pasar tenaga kerja. Namun, pada 2016 BPS meluncurkan data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pertama yang mencakup disabilitas. Meskipun Sakernas hanya mengakomodasi satu pertanyaan dalam kuesioner, namun memungkinkan kita untuk melakukan analisis mengenai situasi PD saat ini di pasar tenaga kerja dan diharapkan akan memperbaiki rancangan kebijakan mengenai PD.

Penelitian ini mencoba memetakan kondisi PD di pasar tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan Sakernas 2016. Poin utama yang akan digali dari data tersebut adalah kondisi sosial ekonomi PD, karakteristik PD yang dipekerjakan, dan sebaran upah PD. Analisis ini dibandingkan dengan kondisi non-penyandang disabilitas (Non-PD) untuk konteks relevansi. Laporan ini disajikan dalam urutan sebagai berikut: Bagian pertama membahas tinjauan pustaka berkenaan dengan definisi dan berbagai pengukuran disabilitas, partisipasi PD dalam angkatan kerja dan perbedaan upah PD dibandingkan dengan Non-PD. Bagian kedua memberikan penjelasan yang cukup komprehensif tentang Sakernas 2016 terkait hubungan status kerja dan karakteristik sosial ekonomi PD. Beberapa perbandingan yang disajikan adalah: karakteristik sosial ekonomi antara PD yang dipekerjakan dan Non-PD yang dipekerjakan, disparitas pendapatan antara PD dan Non-PD, serta karakteristik antara PD bekerja dan tidak bekerja. Bagian ketiga memberikan model ekonometri untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan pada probabilitas PD mendapat pekerjaan, dan siapa yang mendapat pekerjaan di antara PD.

Istilah disabilitas yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan disabilitas dalam Sakernas periode 1 di tahun 2016. Kategorisasi menyandang disabilitas/tidak didasarkan pada persepsi responden tentang disabilitas. Seorang responden akan dikategorikan sebagai PD jika mereka “merasa” memiliki kesulitan/gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik (mobilitas), menggunakan/menggerakkan jari/tangan, berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain dan beberapa disabilitas lainnya (misalnya mengingat, berkonsentrasi, emosi, perawatan diri, dll). Tingkat disabilitas juga didasarkan pada persepsi responden, apakah mereka “merasa” kesulitan ringan, kesulitan berat atau tidak sama sekali. Dalam penelitian ini, seseorang dianggap sebagai PD jika dia memiliki sekurang-kurangnya satu jenis dan tingkat disabilitas. PD dengan disabilitas berat mengacu pada setiap orang yang menyandang sekurang-kurangnya satu disabilitas berat, sementara PD dengan disabilitas ringan mengacu pada setiap orang yang menyandang sekurang-kurangnya satu disabilitas ringan tetapi tidak menyandang disabilitas berat apa pun. Oleh karena itu, jumlah total PD dengan disabilitas ringan dan PD dengan disabilitas berat akan sama dengan jumlah PD di Indonesia.



## 1.2. Tinjauan Pustaka

### 1.2.1. Definisi Disabilitas: Perbandingan

Di Indonesia, statistik menunjukkan jumlah PD yang berbeda-beda. Jumlah dan persentase bervariasi antara kurang dari 1 persen (Podes, 2014) hingga lebih dari 12 persen (Sakernas, 2016). Tabel 1 menunjukkan perbedaan prevalensi disabilitas dari berbagai sumber data. Perbedaan tersebut tidak hanya muncul pada statistik yang dipublikasikan, tapi juga statistik yang diacu oleh kementerian-kementerian terkait. Contohnya, menurut data Pusdatin Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11 juta, sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah 7 juta (ILO, 2013). Banyaknya versi data tentang PD cukup mengganggu karena memengaruhi kualitas seberapa baik kebijakan dijalankan.

Beragamnya tingkat prevalensi disabilitas di Indonesia ini berkaitan dengan definisi yang digunakan dalam mengukur disabilitas. Ini juga terkait dengan seberapa baik data disabilitas dikumpulkan. Rancangan pertanyaan dan sumber pelaporan yang dipertimbangkan dapat memengaruhi perkiraan; apakah sebuah survei kesehatan atau umum, aspek disabilitas yang dilaporkan sendiri atau diukur—semuanya akan mempengaruhi bagaimana orang menjawab pertanyaan atau data yang dihasilkan (WHO, 2001).

Sementara data disabilitas yang akurat sebagian besar tidak tersedia di Indonesia, satu langkah maju sedang dilakukan melalui definisi disabilitas yang lebih baik melalui UU yang baru, UU No. 19 Tahun 2011. UU tersebut memperkenalkan istilah “disabilitas” menggantikan “penyandang cacat” yang dinyatakan di undang-undang sebelumnya, UU No. 4 Tahun 1997. “Penyandang cacat” dekat dengan istilah lama “kelainan” sementara “disabilitas” mengakomodasi pendekatan terbaru, pendekatan “kesulitan dalam berfungsi”. “Penyandang cacat” mendefinisikan orang dengan disabilitas sebagai setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental—yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan dan kendala baginya untuk menggunakan dengan semestinya—yang terdiri dari cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. “Penyandang disabilitas” berarti orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu lama yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menangani orang lain yang membuat dirinya sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Perubahan istilah ini mengubah paradigma di Indonesia bagi penyandang disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak. Akibatnya, penanggulangan masalah penyandang disabilitas tidak hanya terfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada penyediaan dan pemeliharaan lingkungan fisik untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas (Kementerian Sosial, 2011).

Bahkan setelah mengadopsi istilah internasional disabilitas, masih ada keragaman dalam pengukuran disabilitas di Indonesia yang membuat prevalensi disabilitas dan analisis disabilitas menjadi tidak bisa diperbandingkan antar sumber pengukuran disabilitas. Di Indonesia, ada beberapa kegiatan pengumpulan data (sensus dan survei) yang mengukur disabilitas, misalnya SP 2010, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sakernas 2016, Podes dan Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Berbagai pengukuran disabilitas ini menghasilkan beragam prevalensi disabilitas di Indonesia—yang akan

memengaruhi penelitian dan analisis disabilitas di Indonesia. Tabel 1 di bawah menunjukkan berbagai pengukuran dan prevalensi disabilitas dari beberapa kegiatan pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Lampiran 1 memberikan pertanyaan yang diajukan dalam survei.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Podes masih memiliki definisi disabilitas paling kasar, yaitu “tuna”. Tuna digunakan di hukum Indonesia sebelumnya, dan karena maknanya yang kasar, yaitu ‘tidak memiliki’ atau “tanpa” dalam bahasa Jawa (Adioetomo et al., 2014), Indonesia kemudian merevisinya. Namun, Podes masih menggunakan istilah ini hingga sekarang. Selain itu, prevalensi disabilitas di Podes yang memiliki angka paling rendah mungkin karena terlalu rendahnya penilaian perangkat desa terhadap kondisi disabilitas masyarakat mereka.

Di antara survei terhadap orang dalam usia berapa pun (tanpa batasan usia), Riskesdas tampak memiliki prevalensi disabilitas yang lebih tinggi dan lebih sesuai dengan yang ditemukan di negara lain (Adioetomo et al., 2014). Diklaim bahwa pengukuran di Riskesdas mengikuti International Classification of Functioning (ICF). Pengukuran disabilitas berdasarkan ICF dinilai dalam Jadwal Penilaian Disabilitas WHO (WHODAS) 2.0. Ada dua versi kuesioner: versi 12 item–yang digunakan dalam Riskesdas–dan versi 36 item. Masing-masing versi menanyakan tentang kesulitan karena kondisi kesehatan selama 30 hari terakhir dengan menggunakan lima kategori jawaban: tidak ada, ringan, sedang, berat, sangat berat dan tidak bisa.

Tabel 2 menggambarkan bagaimana lima sumber data mengukur tingkat prevalensi di provinsi-provinsi di Indonesia. Tabel tersebut menunjukkan 10 provinsi teratas yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia dalam semua (lima) data, empat data, dan tiga data. Secara konsisten, Gorontalo muncul sebagai provinsi 10 teratas dalam lima sumber data. Sementara itu, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Barat tampil sebagai provinsi 10 teratas secara konsisten di empat sumber data. Terakhir, Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang merupakan 10 teratas di tiga sumber data. Data lengkap peringkat provinsi di setiap sumber data tersedia di Lampiran 2.

Melihat fakta statistik disabilitas yang berbeda di Indonesia, maka diperlukan untuk melakukan standarisasi metode pengukuran disabilitas untuk memperbaiki analisis dan rancangan kebijakan. Ini juga untuk memudahkan perbandingan disabilitas dengan negara lain.

**Tabel 1. Perbandingan Pengukuran Disabilitas di Indonesia**

Kegiatan Pengumpulan Data	Tahun	Pengukuran Disabilitas	Kategori Jawaban	Prevalensi Disabilitas	Jumlah Observasi
SP	2010	Menanyakan kepada perorangan, apakah dia memiliki kesulitan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik, mengingat, berkonsentrasi, atau berkonsentrasi dengan orang lain, dan perawatan diri bahkan setelah menggunakan alat bantu disabilitas (untuk melihat dan mendengar).	Tiga kategori jawaban: tidak ada, sedikit, parah.	4,30%	237.641.326
Podes	2011	Menanyakan kepada perangkat desa tentang jumlah penyandang disabilitas di desa tersebut untuk sembilan jenis disabilitas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunarungu-wicara, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, cacat eks-sakit kusta dan cacat fisik-mental.	Menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di desa tersebut untuk setiap jenis disabilitas.	0,41%	78.614 desa
Susenas	2012	Menanyakan kepada perorangan, apakah dia memiliki disfungsi/keterbatasan/disabilitas dalam melihat (bahkan setelah menggunakan kaca mata), mendengar (bahkan setelah menggunakan alat bantu dengar), berkomunikasi dengan orang lain (dalam hal berbicara), mengingat/berkonsentrasi, berjalan/naik, dan perawatan diri.	Tiga kategori jawaban: tidak, ringan, berat.	2,31%	277,854 orang
Risikesdas	2013	Mengadaptasi 12 pertanyaan dari WHODAS 2 sebagai operasionalisasi ICF. Risikesdas menggunakan definisi disabilitas yang lebih luas.	Lima kategori jawaban: tidak ada, ringan, sedang, berat, sangat berat	11%	300,000 rumah tangga

Kegiatan Pengumpulan Data	Tahun	Pengukuran Disabilitas	Kategori Jawaban	Prevalensi Disabilitas	Jumlah Observasi
Sakernas	2016	Menanyakan kepada perorangan, apakah dia memiliki kesulitan/gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik (mobilitas), menggunakan/menggerakkan jari/tangan, berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, disabilitas lain (misalnya mengingat, berkonsentrasi, emosi, perawatan diri dan sebagainya)	Tiga kategori jawaban: tidak, sedang, berat.	12,15% (untuk usia 15 ke atas)	131.339 orang

Sumber: Adioetomo et al. (2014) dan Kemenkes (2013)

**Tabel 2. Provinsi di 10 Teratas Prevalensi Disabilitas dari 5 Sumber Data Disabilitas**

Tingkat Prevalensi	Provinsi
10 teratas di 5 Data	Gorontalo
10 teratas di 4 Data	Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Barat
10 teratas di 3 Data	Nusa Tenggara Timur

Sumber: Halimatussadiyah et al. (2015) dan penghitungan penulis

### 1.2.2. PD dan Partisipasi di Pasar Tenaga Kerja

Banyak penelitian menunjukkan bahwa PD mengalami kesulitan dalam memasuki pasar tenaga kerja. Mavromaras et al. (2007) menemukan bahwa disabilitas menurunkan probabilitas dipekerjakan sebesar 17,6 persen dan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja sebesar 16,9 persen di kalangan orang berusia 15-64 tahun di Australia pada 2003. Demikian pula, Campolieti (2002) menemukan bahwa disabilitas menurunkan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja di kalangan orang tua di Kanada. Penelitian ini memperkirakan disabilitas dari beberapa variabel kondisi dan status kesehatan, misalnya masalah pernapasan, diabetes, kondisi jantung, IMT, usia, sejumlah kondisi rumah tangga/perorangan dan sebagainya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Brown & Emery (2010) menemukan bahwa disabilitas berkaitan dengan penurunan 30 persen dalam partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan Kanada.

Penelitian-penelitian lain menunjukkan beberapa faktor yang berkaitan dengan isu partisipasi PD. Mavromaras et al. (2007) menemukan bahwa disabilitas anggota sebuah keluarga berkaitan dengan rendahnya partisipasi tenaga kerja untuk anggota lain (non-penyandang disabilitas) keluarga tersebut. Ini menunjukkan bahwa PD kemungkinan memiliki ketergantungan dengan anggota keluarganya. Dampak disabilitas pada partisipasi dalam angkatan kerja lebih besar untuk laki-laki dan perempuan lajang dibandingkan dengan perempuan menikah (Loprest et al., 2016).

Oguzoglu (2009) meneliti tentang hubungan tingkat keparahan disabilitas dengan partisipasi dalam angkatan kerja. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat disabilitas sangat berat, berat, sedang, ringan dan rendah secara signifikan mengurangi probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja untuk laki-laki, dan hanya tingkat disabilitas sangat berat, berat dan sedang secara signifikan mengurangi probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja untuk perempuan.

Kurang tersedianya lapangan kerja yang sesuai merupakan alasan yang paling sering dikemukakan oleh PD untuk tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Mereka juga enggan mencari pekerjaan karena kebutuhan khusus akan akomodasi yang mungkin menjadi kendala bagi prospek untuk dipekerjakan (Loprest, 2001). Di antara negara-negara berkembang, tingkat kesenjangan pekerjaan kerap kali lebih besar di negara berpendapatan menengah dibandingkan negara berpendapatan rendah (Mitra, 2013).

Dalam kasus Indonesia, temuan Halimatussadiah et al. (2015) merupakan penelitian pertama yang menguraikan karakteristik angkatan kerja PD. Mereka menemukan bahwa ukuran angkatan kerja PD jauh lebih kecil dibandingkan ukuran angkatan kerja Non-PD. Mereka menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah merupakan kendala utama PD untuk memasuki pasar tenaga kerja. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa kendala kelembagaan, misalnya, rendahnya jumlah sekolah dan infrastruktur untuk mengakses sekolah merupakan faktor di balik rendahnya tingkat pendidikan PD.

Meskipun memiliki keterbatasan dalam kegiatan sehari-hari yang disebabkan oleh disabilitas fisik atau mental, banyak penyandang disabilitas berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, mereka tetap kurang berkemungkinan dipekerjakan dibandingkan orang lain. Sejumlah PD memberi kesaksian bahwa sikap diskriminatif dari pengusaha terlihat jelas pada saat perekrutan (Cook, 2006). Di sisi lain, beberapa pengusaha menyatakan ragu mempekerjakan PD karena beberapa alasan, termasuk kurangnya kesadaran tentang disabilitas dan kekhawatiran akan akomodasi, masalah terkait biaya dan kewajiban hukum (Kaye et al., 2011).

Beberapa penelitian mencoba menemukan faktor penyebab kesenjangan tingkat perekrutan PD. Potts (2005) menemukan bahwa modal sosial mungkin menjadi sebagian penyebab tingkat pengangguran penyandang jenis disabilitas tertentu. Probabilitas dipekerjakan dipengaruhi oleh prospek bahwa PD mungkin kurang memiliki jaringan sosial yang efektif. Penelitian lain menunjukkan bahwa isu terkait gender juga muncul dalam menjelaskan tingkat pengangguran PD. Mitra (2013) menyatakan bahwa disabilitas mungkin merupakan hambatan utama perekrutan antara perempuan dan laki-laki. Bagi perempuan, hambatan terkait gender mungkin tidak menjadi beban sebesar untuk laki-laki. Dalam analisis

yang lebih spesifik, Baldwin & Johnson (2015) menemukan bahwa laki-laki relatif terhambat oleh keterbatasan mobilitas dan kekuatan dibanding perempuan, sementara keterbatasan kapasitas sensorik dan kinerja memiliki dampak sebaliknya.

### **1.2.3. PD, Non-PD dan Perbedaan Upah**

Tidak dapat disangkal bahwa bagi sebagian orang, disabilitas bisa mengganggu kinerja mereka dalam memangku sebuah pekerjaan dan perusahaan dalam kadar tertentu harus memberikan kebutuhan khusus untuk mereka. Namun, banyak orang lain yang berkinerja baik tidak bisa memperoleh upah setara dengan beberapa alasan. Diskriminasi terhadap PD tidak hanya menghambat kesempatan mereka mencari pekerjaan, tapi juga menyebabkan kesenjangan upah bagi PD yang sudah bekerja.

Studi-studi memperlihatkan bahwa disabilitas ditemukan memiliki hubungan negatif dengan pendapatan. Salah satu penelitian berbasis survei awal mencatat bahwa ada banyak perbedaan dalam perkiraan tawaran upah yang diterima oleh PD, yang timbul dari perbedaan tingkat ketidakmampuan kerja terkait (Baldwin et al., 1994). Hasil serupa juga ditemukan oleh Jones (2008), termasuk setelah mengendalikan definisi disabilitas spesifik, sumber data, negara atau periode waktu disabilitas. Pendidikan bisa berfungsi sebagai penyangga untuk melindungi dari potensi dampak negatif upah namun tidak cukup untuk mempersempit kesenjangan (Hollenbeck & Kimmel, 2008).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Jones et al. (2011) mencatat bahwa hubungan antara penghasilan dan disabilitas lebih kuat di kalangan pekerja disabilitas dengan keterbatasan kemampuan kerja dibandingkan dengan pekerja disabilitas tanpa keterbatasan kemampuan kerja. Namun, kekuatan hubungan semacam itu masih bisa dipertanyakan karena variabel yang tidak teramati mungkin muncul setelah mengendalikan heterogenitas perorangan.

Selain itu, Brown & Emery (2008) menemukan bahwa laki-laki penyandang disabilitas ringan, sedang, berat dan sangat berat memiliki pendapatan 21 persen, 30 persen, 40 persen dan 55 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki non-penyandang disabilitas. Sedangkan untuk perempuan, perkiraan dampak berkisar dari penurunan pendapatan 19 persen untuk disabilitas ringan hingga penurunan 49 persen untuk disabilitas sangat berat.

**BAB** ini dimaksudkan untuk menguraikan temuan dari data Sakernas 2016 terkait dengan disabilitas. Fokusnya adalah memotret karakteristik PD di Indonesia, membandingkan partisipasi PD dan Non-PD di pasar tenaga kerja, dan mengkaji perbedaan upah antara PD dan Non-PD. Sakernas 2016 mencakup 131.330 pengamatan dengan orang berusia 15 tahun ke atas sebagai sampel responden. Metode yang digunakan pada bagian ini umumnya adalah analisis deskriptif.

## 2.1. Potret karakteristik PD di Indonesia

Di kalangan orang berusia 15 tahun ke atas, terdapat 12,15 persen orang yang hidup dengan disabilitas (sekitar 22,8 juta orang). Mempertimbangkan tingkat disabilitas, terdapat 1,87 persen penyandang disabilitas berat dan 10,29 persen penyandang disabilitas ringan. Dibandingkan dengan data global, prevalensi disabilitas dari data Sakernas 2016 masih lebih rendah dibandingkan data yang dipublikasikan oleh WHO (2011), dengan tingkat prevalensi disabilitas rata-rata 15,6 persen (18 tahun ke atas), berkisar 11,8 persen di negara berpenghasilan tinggi dan 18 persen di negara berpenghasilan rendah, dan disabilitas berat untuk orang dewasa sebesar 2,2 persen.

Statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas ringan di Indonesia adalah sekitar lima kali lebih besar dibanding jumlah penyandang disabilitas berat. Sebagian besar PD memiliki multi-disabilitas—sekitar 40 persen disabilitas majemuk ringan dan sekitar 38 persen disabilitas majemuk berat. Mengenai kategori gangguan, gangguan penglihatan merupakan jenis disabilitas yang paling banyak ditemukan. Sekitar 37 persen penyandang disabilitas ringan dan 17 persen penyandang disabilitas berat memiliki gangguan penglihatan (lihat Lampiran 3).

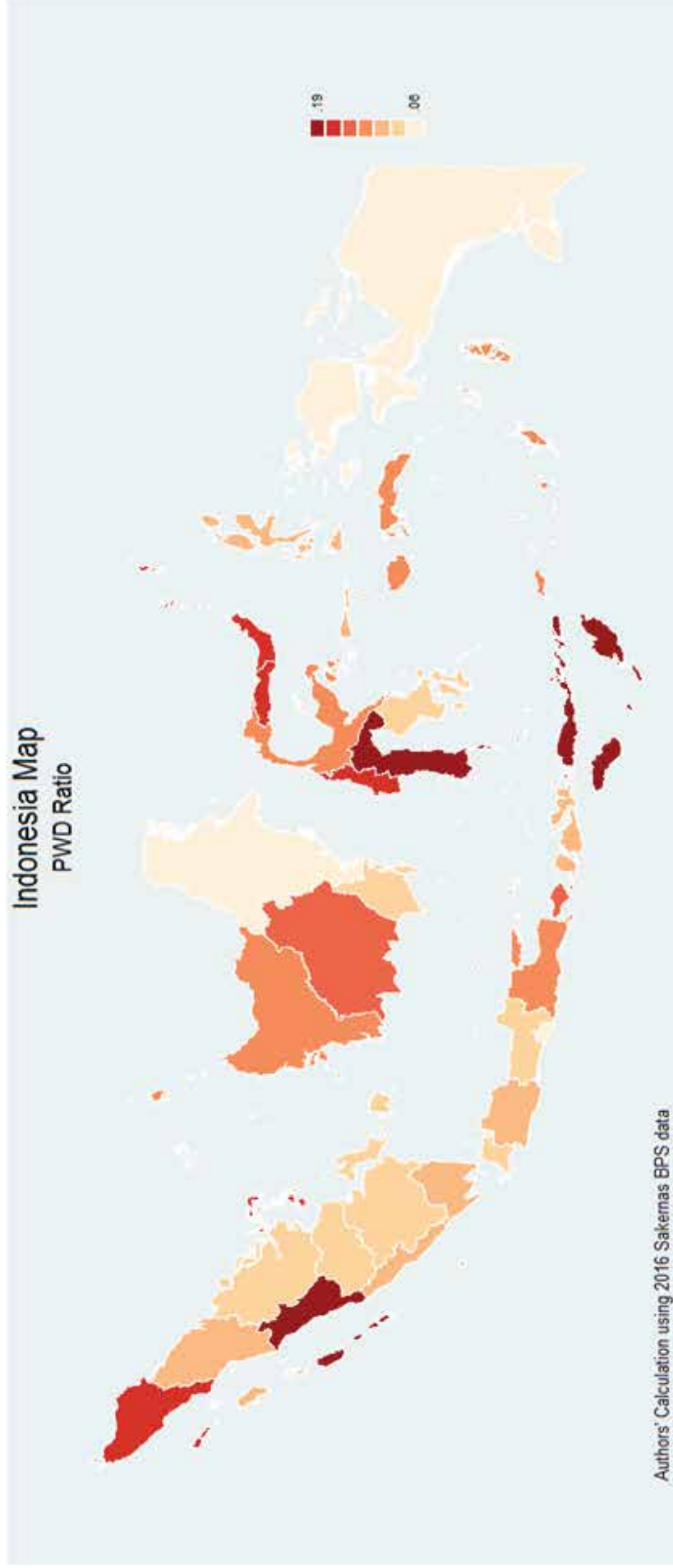
Di antara daerah-daerah di Indonesia, Sulawesi memiliki prevalensi disabilitas tertinggi, yaitu 14,5 persen berbanding 12,2 persen prevalensi Indonesia (lihat Lampiran 4). Baik disabilitas ringan maupun berat memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu 12,1 persen untuk yang pertama dan 2,4 persen untuk yang kedua. Daerah kedua yang memiliki prevalensi disabilitas tertinggi adalah Nusa Tenggara. Daerah ini diperkirakan memiliki angka pertikaian lokal dan gizi buruk yang tinggi, sehingga meningkatkan prevalensi disabilitas di daerah ini. Secara keseluruhan, kisaran tingkat

prevalensi disabilitas di semua provinsi bervariasi antara 6,41 persen dan 18,75 persen. Untuk disabilitas ringan, kisarannya adalah antara 5,73 persen dan 15,83 persen, sedangkan untuk disabilitas berat adalah antara 0,62 persen dan 2,92 persen. Perhatian harus diberikan kepada pulau Sulawesi yang memiliki banyak provinsi yang memiliki tingkat prevalensi disabilitas tinggi.

Daerah dengan prevalensi disabilitas terkecil adalah Papua, yang hanya 8,5 persen. Namun, hasil Papua ini mungkin saja bias karena ketidakseimbangan data akibat banyaknya lokasi yang tidak terjangkau di daerah perdesaan dan terpencil. Membandingkan satu provinsi dengan provinsi lain, Sumatera Barat memiliki prevalensi disabilitas tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 18,8 persen. Prevalensi disabilitas di seluruh provinsi dapat dilihat di Gambar 1. Ini menunjukkan tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi ketiga, yaitu Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.



**Gambar 1. Prevalensi Disabilitas di Seluruh Provinsi**



Dalam hal tingkat keparahan disabilitas provinsi, ada variasi persentase penyandang disabilitas ringan atau berat. Papua dan Kepulauan Riau memiliki persentase tertinggi penyandang disabilitas ringan, yaitu masing-masing 93,2 persen dan 92,7 persen. Sementara Kalimantan Utara dan D.I. Yogyakarta memiliki persentase tertinggi penyandang disabilitas berat, yaitu masing-masing 27,8 persen dan 25,8 persen.

Setiap provinsi memiliki sebaran berbeda berkenaan dengan jenis prevalensi disabilitas. Misalnya, Kepulauan Riau memiliki tingkat prevalensi tertinggi untuk gangguan penglihatan (84,58%), namun menjadi provinsi dengan tingkat prevalensi terendah baik untuk gangguan mobilitas maupun gangguan pendengaran. Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi baik untuk gangguan mobilitas (43,79%) maupun gangguan tangan/genggaman (18,85%). Untuk gangguan pendengaran, provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Yogyakarta (27,74%).

Dalam hal sebaran PD di provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki jumlah PD tertinggi. Fakta ini tidaklah mengherankan, karena Pulau Jawa dihuni oleh 58 persen penduduk Indonesia (dihitung dari Sensus 2010). Sebanyak 18 persen PD tinggal di Jawa Barat, sementara masing-masing 17 persen dan 13 persen tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gambaran data tersebut ada di Lampiran 5.

**Tabel 3. Membandingkan Kondisi Sosial dan Demografi PD dan Non-PD di Indonesia**

Variabel	PD	Non-PD	Total	
Ukuran Rumah Tangga	3,69	4,26	4,19	4,19
Usia	57,45	36	38,61	38,61
<b>Lokasi</b>				
Perkotaan	49.32%	55.13%	4.19	4.19
Perdesaan	50.68%	44.87%	38.61	38.61
<b>Pendidikan</b>				
Belum Pernah/Tidak Lulus Sekolah Dasar	45,74%	12,69%	16,70%	31.334.876
Sekolah Dasar	26,38%	26,03%	26,07%	48.905.026
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	10,64%	23,39%	21,84%	40.968.590
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12,41%	28,29%	26,36%	49.459.006
Perguruan Tinggi	4,83%	9,61%	9,03%	16.933.136
<b>Jenis Kelamin</b>				
Perempuan	53,37%	49,64%	50,09%	93.974.703
Laki-laki	46,63%	50,36%	49,91%	93.625.931
<b>Status Perkawinan</b>				
Status Lain	38,48%	34,06%	34,60%	64.904.579
Menikah	61,52%	65,94%	65,40%	122.696.055

Sumber: Penghitungan penulis

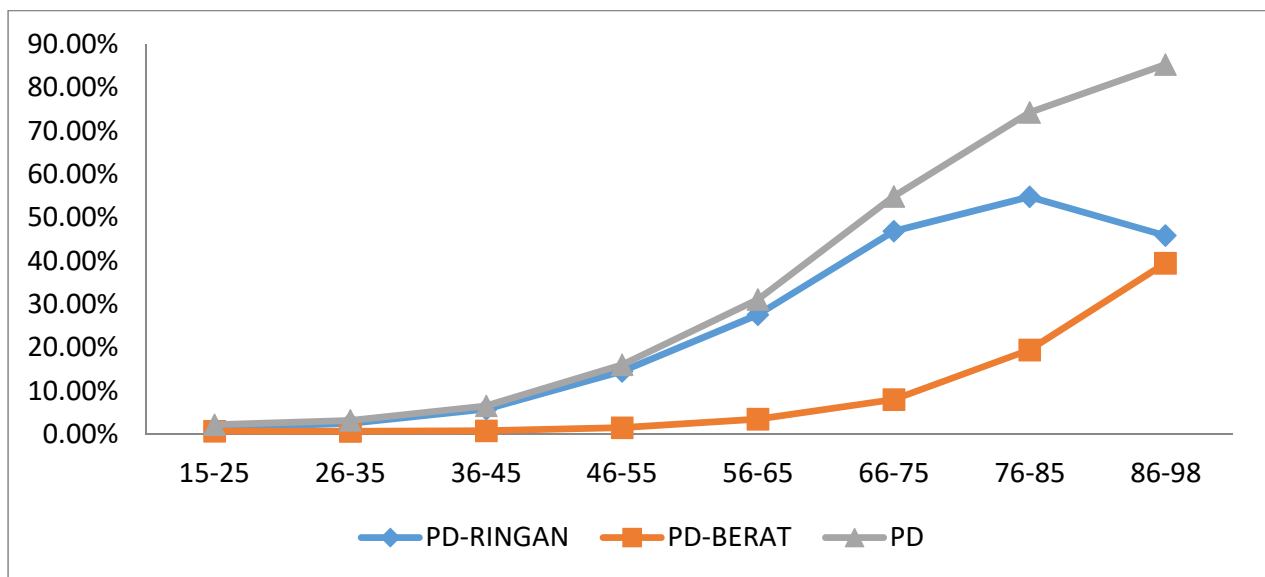
Tabel 3 memberikan informasi singkat mengenai kondisi sosial demografi PD dibandingkan dengan Non-PD. Ukuran rumah tangga Non-PD cenderung lebih besar dibandingkan PD. Kondisi ini mungkin karena lebih tingginya persentase Non-PD yang berstatus menikah. Lebih rendahnya persentase PD yang menikah dibandingkan dengan Non-PD mungkin disebabkan oleh lebih rendahnya probabilitas PD mendapatkan pasangan yang tepat yang bisa menerima disabilitas mereka.

Dalam hal usia, PD cenderung memiliki usia rata-rata jauh lebih tinggi daripada Non-PD. Lebih tingginya probabilitas mengalami kecelakaan dan menurunnya kondisi fisik saat orang bertambah tua mungkin menjadi penyebab kondisi ini. Pada Gambar 2, prevalensi disabilitas meningkat seiring bertambahnya usia, dan setelah kelompok usia 76-85, prevalensi disabilitas ringan menurun. Saat semakin menua, fungsi tubuh akan memburuk dan semakin memiliki probabilitas terkena penyakit. Akibatnya, orang akan semakin memiliki probabilitas menyandang disabilitas saat mereka bertambah tua. Kecenderungan menurunnya prevalensi disabilitas ringan dari kelompok usia 76-85 hingga kelompok usia 86-98 mungkin disebabkan oleh terkonversinya disabilitas dari disabilitas ringan menjadi berat pada usia tersebut, sehingga prevalensi disabilitas berat meningkat pada periode itu.

Mengenai lokasi, PD cenderung tinggal di daerah perdesaan. Minimnya akses, fasilitas, dan kondisi kesehatan di daerah perdesaan bisa meningkatkan jumlah PD di daerah ini. Kesulitan PD untuk bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan mungkin menjadi penyebab PD bertahan di daerah perdesaan.

Dalam hal pendidikan, hampir separuh PD tidak lulus sekolah dasar atau tidak pernah bersekolah. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan pendidikan Non-PD, yang persentasenya untuk tidak lulus SD atau tidak pernah bersekolah hanya 12,7 persen. Fakta ini didukung oleh Lamichhane & Kawakatsu (2015) yang menemukan bahwa anak berusia 6-18 tahun penyandang disabilitas ringan dan berat cenderung tidak bersekolah. Selanjutnya, persentase PD yang berpendidikan perguruan tinggi hanya sekitar separuh persentase Non-PD.

Melihat jenis kelamin orang berusia 15 tahun ke atas, Non-PD memiliki jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sementara penyandang disabilitas ringan dan berat cenderung memiliki jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, 50,4 persen Non-PD adalah laki-laki, sementara hanya 46,4 persen dan 48 persen penyandang disabilitas ringan dan berat adalah laki-laki. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh diskriminasi terhadap anak perempuan atau perempuan dewasa, misalnya penyiksaan dan gizi buruk, sehingga mereka menghadapi probabilitas yang lebih tinggi untuk menjadi penyandang disabilitas.

**Gambar 2. Prevalensi Disabilitas menurut Kelompok Usia**

Sumber: Penghitungan Penulis

## 2.2. Partisipasi PD di Pasar Tenaga Kerja

Sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang disabilitas dan partisipasi angkatan kerja atau tingkat perekrutan, penyandang disabilitas ringan dan berat memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang jauh lebih rendah sebagaimana terlihat pada Tabel 4, yang hanya 56,72 persen untuk yang pertama dan 20,27 persen untuk yang kedua. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Non-PD, yaitu 70,40 persen. Kesulitan PD untuk memasuki angkatan kerja mungkin disebabkan oleh beberapa diskriminasi yang dihadapi oleh PD, yaitu diskriminasi kelembagaan, diskriminasi lingkungan fisik dan diskriminasi sosial (Yeo & Moore, 2003). Mempertimbangkan tingkat ketidakaktifan, persentase orang yang tidak aktif (orang yang tidak masuk angkatan kerja) dari penyandang disabilitas ringan dan berat jauh lebih tinggi daripada persentase orang yang tidak aktif untuk Non-PD. Di antara orang yang tidak aktif, persentase penyandang disabilitas ringan dan berat yang berstatus pelajar jauh lebih rendah dibandingkan persentase Non-PD yang berstatus pelajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa PD sulit untuk masuk ke dunia pendidikan dibandingkan dengan Non-PD karena lebih tingginya biaya pendidikan dan lebih rendahnya tingkat pengembalian investasi pendidikan untuk PD (akan dibahas nanti). Akibatnya, PD yang tidak aktif cenderung mengerjakan hal lain (bukan pelajar dan ibu rumah tangga).

**Tabel 4. Penyandang Disabilitas di Angkatan Kerja Indonesia**

Status	PD	PD-ringan	PD-berat	Persen
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>70,40%</b>	<b>56,72%</b>	<b>20,27%</b>	<b>68,06%</b> <b>(127.671.869)</b>
Bekerja	66,42%	54,63%	18,32%	64,31% (120.647.697)
Tidak Bekerja	3,98%	2,08%	1,95%	3,74% (7.024.172)
<b>Tidak di Angkatan Kerja</b>	<b>29,60%</b>	<b>43,28%</b>	<b>79,73%</b>	<b>31,94%</b> <b>(59.928.765)</b>
Ibu Rumah Tangga	18,13%	28,71%	21,14%	19,27% (36.158.428)
Pelajar	9,74%	0,84%	0,85%	8,66% (16.245.007)
Lain-lain	1,73%	13,74%	57,74%	4,01% (7.525.330)
<b>Total Populasi</b>	<b>100,00%</b> <b>(164.804.980)</b>	<b>100,00%</b> <b>(19.296.030)</b>	<b>100,00%</b> <b>(3.499.624)</b>	<b>100,00%</b> <b>(187.600.634)</b>
Tingkat pengangguran <sup>2</sup>	5,65%	3,67%	9,63%	5,50%

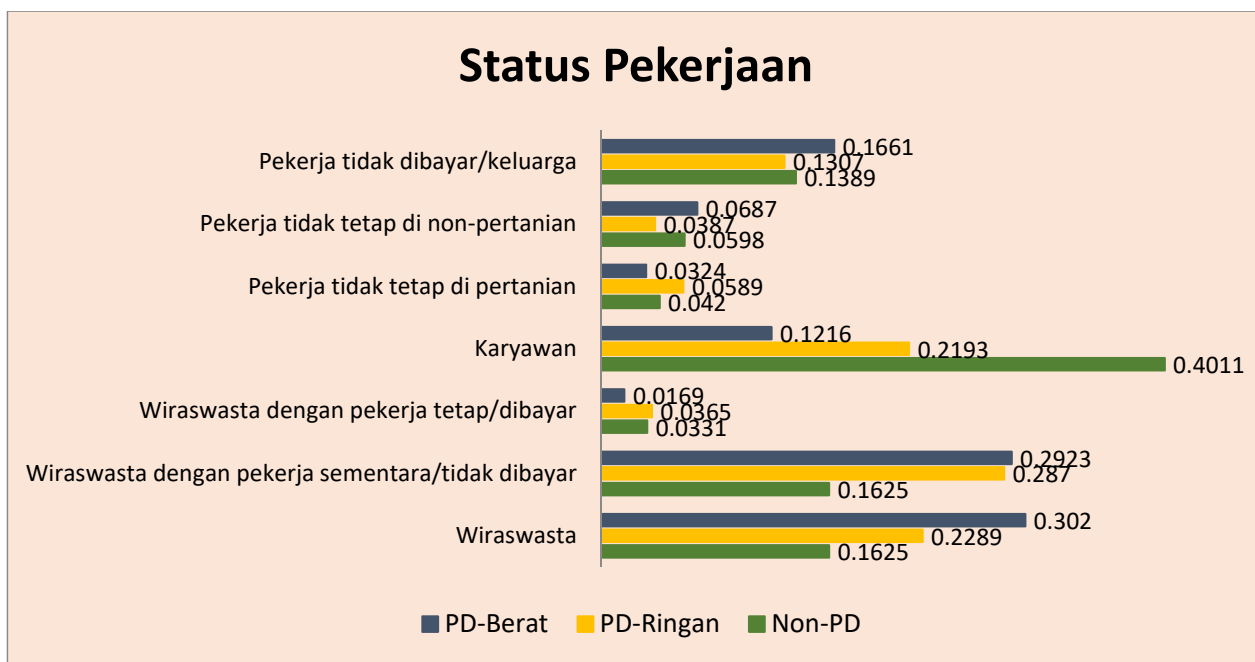
Sumber: Penghitungan Penulis

Tingkat pengangguran penyandang disabilitas ringan lebih rendah daripada Non-PD, sementara tingkat pengangguran penyandang disabilitas berat lebih tinggi daripada Non-PD. Statistik ini menunjukkan bahwa begitu penyandang disabilitas ringan memasuki angkatan kerja, mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan penyandang disabilitas berat. Ini mungkin disebabkan oleh kondisi penyandang disabilitas berat yang lebih buruk, sehingga mereka memiliki kemampuan lebih rendah, yang menyebabkan lebih rendahnya pilihan pekerjaan. Akibat dari lebih rendahnya pilihan pekerjaan, penyandang disabilitas berat memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan penyandang disabilitas ringan/non-penyandang disabilitas.

Di sektor pekerjaan, sebagian besar PD bekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan (mengacu Lampiran 6). Persentase PD di sektor-sektor tersebut hampir dua kali lebih tinggi dari pada Non-PD (46,01% berbanding 29,51% Non-PD). Mengenai status pekerjaan, hampir separuh Non-PD bekerja sebagai karyawan (sekitar 40,11%). Statistik ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyandang disabilitas ringan dan berat yang bekerja sebagai karyawan, 21,93 persen untuk yang pertama dan 12,16 persen untuk yang kedua. Disabilitas nampaknya menjadi beban bagi PD untuk memasuki pasar tenaga kerja sebagai pekerja karena kompetitifnya pasar tenaga kerja. Baik penyandang disabilitas ringan maupun berat cenderung bekerja sebagai wiraswasta, wiraswasta dengan pekerja sementara/tidak dibayar, dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Visualisasi status pekerjaan bisa dilihat dari gambar di bawah ini.

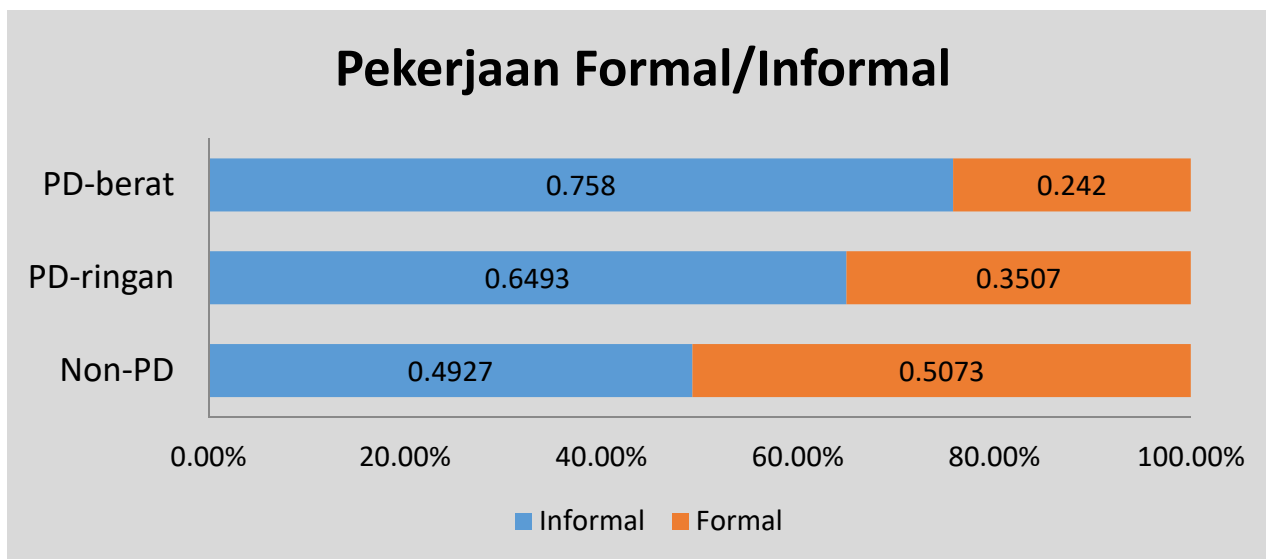
2 Angka pengangguran: Jumlah Orang/Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja

**Gambar 3. Status Pekerjaan**



Sumber: Penghitungan Penulis

**Gambar 4. Status Pekerjaan Formal/Informal**



Sumber: Penghitungan Penulis

Selanjutnya, jika kita mengategorikan masing-masing status pekerjaan menjadi pekerjaan formal dan informal, sebagian besar PD bekerja di sektor informal. Persentase penyandang disabilitas ringan dan berat yang bekerja di pekerjaan informal masing-masing adalah 64,93 persen dan 75,80 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan Non-PD yang hanya 49,27 persen. Gambaran status pekerjaan formal/informal yang dimiliki oleh PD dan Non-PD ada pada Gambar 4. Kategorisasi status pekerjaan menjadi formal/informal mengacu pada status kerja (Gambar 3) dan jenis pekerjaan seperti manajer, ahli profesional,

dukungan klerikal, jasa/penjualan, pertanian, operator mesin dan perakit, pekerja tidak terampil, dan tentara/polisi (lihat Lampiran 7).

Dalam soal jarak ke tempat kerja, sebagian besar PD tinggal dekat dengan rumah/tempat mereka. Sekitar 89 persen dan 86 persen penyandang disabilitas berat dan ringan menempuh perjalanan kurang dari 10 km ke tempat kerja mereka (lihat Lampiran 8). Dibandingkan dengan persentase Non-PD yang menempuh perjalanan kurang dari 10 km, yang berjumlah sekitar 79 persen, persentase PD yang menempuh perjalanan kurang dari 10 km ke tempat kerja mereka jauh lebih tinggi. Berkaitan dengan waktu ke tempat kerja, PD cenderung menempuh perjalanan kurang dari atau sekitar 30 menit ke tempat kerja mereka. Fakta ini sejalan dengan statistik sebelumnya yang menyatakan bahwa PD cenderung menempuh perjalanan kurang dari 10 km (lihat Lampiran 9). Fakta bahwa PD cenderung mencari pekerjaan yang dekat dan memiliki waktu tempuh ke tempat kerja yang lebih singkat mungkin karena kesulitan mereka untuk pergi ke tempat lain, terutama untuk beberapa jenis disabilitas, misalnya gangguan penglihatan dan mobilitas. Ini juga didukung oleh fakta bahwa persentase penyandang disabilitas berat dan ringan yang bekerja di rumah sekitar 11 persen dan 5 persen lebih tinggi daripada persentase Non-PD yang bekerja di rumah, yang berjumlah sekitar 17 persen (Lampiran 10).

Ada pola menarik dari orang yang mengambil pekerjaan sampingan. Persentase penyandang disabilitas ringan yang mengambil pekerjaan sampingan lebih tinggi daripada persentase Non-PD, namun persentase penyandang disabilitas berat yang mengambil pekerjaan sampingan lebih rendah daripada persentase Non-PD (Lampiran 11). Fakta ini mungkin terkait dengan upah PD yang lebih rendah dibandingkan upah Non-PD. PD memiliki upah bulanan rata-rata yang lebih rendah sehingga cenderung memiliki pekerjaan sampingan. Namun, penyandang disabilitas ringan mungkin memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan kendala yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan sampingan. Akibatnya, persentase penyandang disabilitas berat yang memiliki pekerjaan sampingan lebih rendah daripada persentase penyandang disabilitas ringan yang memiliki pekerjaan sampingan. Berkenaan dengan fasilitas kerja, persentase PD yang mendapatkan fasilitas kerja lebih rendah di hampir semua jenis fasilitas kerja, misalnya asuransi kesehatan, kompensasi cedera, pesangon, dan lain-lain. Ini mungkin terkait dengan lebih tingginya persentase PD yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan Non-PD.

Di antara orang-orang yang ada di angkatan kerja, menghubungi kerabat merupakan upaya utama untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas berat cenderung mencari pekerjaan melalui menghubungi kerabat dan tidak melamar secara langsung atau melalui pihak ketiga, misalnya bursa kerja dan iklan (Lampiran 12). Mengenai kemauan untuk bekerja, persentase PD yang menginginkan pekerjaan adalah sekitar separuh persentase Non-PD yang menginginkan pekerjaan (Lampiran 13). Selanjutnya, persentase penyandang disabilitas berat yang menginginkan pekerjaan adalah sekitar tiga kali lebih rendah dibandingkan persentase Non-PD. Ini mungkin menunjukkan bahwa banyak PD merasa enggan untuk memiliki pekerjaan. Menyelami lebih dalam alasan mengapa tidak mencari pekerjaan, sebagian besar orang menjawab bahwa mereka sudah memiliki pekerjaan atau bisnis (Lampiran 14). Menariknya, persentase penyandang disabilitas berat yang enggan mencari pekerjaan—sehingga mereka tidak mencari pekerjaan—adalah sekitar lima kali lebih tinggi daripada

Non-PD dan tiga kali lebih tinggi daripada penyandang disabilitas ringan. Fakta ini mendukung fakta sebelumnya bahwa PD memiliki kemauan lebih rendah untuk memiliki pekerjaan dibandingkan Non-PD. Mempertimbangkan alasan mencari pekerjaan, Non-PD cenderung mencari pekerjaan sebagai aktualisasi diri (sudah lulus sekolah atau tidak lagi bersekolah), sementara PD cenderung mencari pekerjaan sebagai tanggung jawab untuk hidup dan mendapatkan uang (Lampiran 15). Biaya hidup PD yang lebih tinggi untuk kompensasi disabilitas mereka mungkin menjadi alasan atas fakta ini (Zaidi & Burchardt, 2003).

### 2.3. Membandingkan Karakteristik Sosial Demografis PD dan Non-PD di Pasar Tenaga Kerja

Bagian ini mencoba menganalisis kondisi sosial-demografis orang-orang dengan status berbeda, misalnya bekerja dan tidak bekerja, bukan angkatan kerja, pekerja dibayar dan tidak dibayar, dan pekerja yang memiliki pekerjaan sampingan dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Analisis dilakukan baik untuk PD maupun Non-PD (lihat Lampiran 16-19).

Seiring bertambahnya usia, persentase PD yang bekerja meningkat dan persentase PD bukan angkatan kerja menurun sampai kelompok usia 46-55 tahun. Setelah kelompok usia 46-55 tahun, persentase PD yang bekerja menurun dan persentase PD bukan angkatan kerja meningkat, baik dengan status “ibu rumah tangga” ataupun “pelajar” dan status “lainnya”. Ini mungkin terjadi karena meningkatnya produktivitas seiring bertambahnya usia hingga suatu titik (produktivitas maksimal), kemudian produktivitas mulai menurun dan orang menghadapi masa pensiun setelahnya. Tren ini mirip dengan tren PD. Namun, penurunan persentase PD yang bekerja dari kelompok 46-55 tahun sampai kelompok 56-65 tahun adalah lebih tinggi daripada Non-PD, yaitu sekitar 19 persen, dibandingkan dengan 8 persen untuk Non-PD.

Dibandingkan dengan Non-PD, persentase PD yang bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Fakta ini mencerminkan hambatan yang dihadapi oleh PD untuk memasuki pekerjaan formal, karena daerah perdesaan menyajikan jenis pekerjaan informal. Kemudahan mencari pekerjaan di daerah perdesaan, terutama pekerjaan untuk pekerja tidak terampil khususnya di sektor pertanian, mungkin menjadi alasan untuk hal ini. Demikian pula, Non-PD juga menunjukkan pola kerja yang sama antara lokasi perdesaan dan perkotaan.

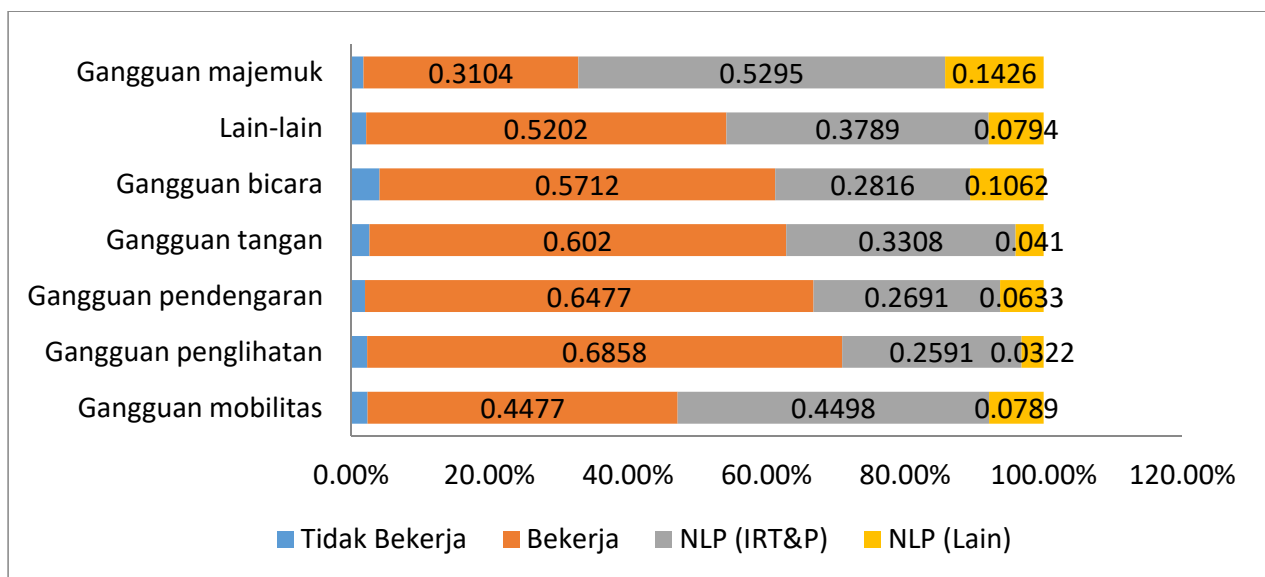
Dalam hal pendidikan, PD dan Non-PD juga menunjukkan tren serupa, di mana orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki persentase tertinggi untuk dipekerjakan. Saat orang mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka lebih dihargai di masyarakat, sehingga probabilitas mereka dipekerjakan meningkat. Mempertimbangkan jenis kelamin, persentase PD laki-laki yang bekerja lebih tinggi daripada persentase PD perempuan yang bekerja, begitu pula Non-PD. Fakta ini mungkin timbul karena beberapa alasan, misalnya 1) Lebih tingginya kecenderungan perempuan untuk tinggal di rumah setelah menikah dan 2) Diskriminasi gender yang mungkin terjadi di pasar tenaga kerja.



Melihat status pekerjaan (formal/informal), persentase pekerja formal menurun seiring bertambahnya usia baik bagi PD maupun Non-PD. Ini sejalan dengan menurunnya kondisi kesehatan dan meningkatnya probabilitas disabilitas seiring bertambahnya usia. Namun, persentase PD dalam pekerja informal lebih tinggi daripada persentase Non-PD. Baik PD maupun Non-PD juga menunjukkan persentase yang lebih tinggi dalam pekerja informal di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan, persentase pekerja di sektor informal menurun. Orang yang lebih berpendidikan cenderung mencari pekerjaan di sektor formal agar sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka dan mendapatkan upah yang layak. Dengan demikian, pekerja berpendidikan cenderung memiliki pekerjaan formal. Dalam hal jenis kelamin, PD dan Non-PD memiliki tren serupa, di mana pekerja perempuan cenderung dipekerjakan di sektor informal. Ini sejalan dengan statistik, yang menunjukkan tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah, dibandingkan dengan tingkat pendidikan laki-laki.

Mempertimbangkan status pembayaran pekerja, persentase PD dan Non-PD berbayar meningkat hingga kelompok usia 26-35 tahun. Setelah itu, menurun lagi. Ini mungkin menjadi tanda bahwa kelompok usia 26-35 tahun adalah kelompok dengan produktivitas maksimal bagi pekerja yang dibayar. Karakteristik lainnya juga menunjukkan pola serupa untuk PD dan Non-PD, di mana persentase pekerja berbayar lebih tinggi di daerah perkotaan cenderung meningkat karena tingkat pendidikan meningkat, lebih tinggi untuk laki-laki dan lebih tinggi untuk orang dengan status lain. Namun, untuk semua karakteristik, persentase pekerja berbayar lebih tinggi untuk Non-PD daripada untuk PD.

Mempertimbangkan pekerjaan sampingan, persentase pekerja PD yang memiliki pekerjaan sampingan meningkat hingga ke kelompok usia 46-55 tahun, dan menurun setelahnya. Di sisi lain, persentase pekerja Non-PD yang memiliki pekerjaan sampingan meningkat hingga ke kelompok usia 55-65 tahun, dan menurun setelahnya. Perbedaan dalam pola memiliki pekerjaan sampingan di seluruh usia mungkin disebabkan oleh disabilitas, terlebih disabilitas akan semakin sulit ditanggung seiring bertambahnya usia. Akibatnya, produktivitas PD mungkin menurun lebih cepat daripada Non-PD. PD dan Non-PD menunjukkan persentase yang lebih tinggi untuk pekerja yang memiliki pekerjaan sampingan di daerah perkotaan. Ini mungkin karena kesempatan kerja yang lebih tinggi di daerah perkotaan. Persentase pekerja perempuan yang memiliki pekerjaan sampingan lebih rendah daripada pekerja laki-laki yang memiliki pekerjaan sampingan. Ini mungkin disebabkan oleh tanggung jawab lain perempuan di rumah tangga mereka (mengurus keluarga sebagai istri dan ibu). Demikian pula, pekerja yang menikah cenderung memiliki pekerjaan sampingan baik untuk PD maupun Non-PD. Tanggung jawab yang lebih tinggi karena jumlah tanggungan yang lebih tinggi mungkin menjadi salah satu alasan untuk hal ini.

**Gambar 5. Status Berdasarkan Jenis Disabilitas PD**

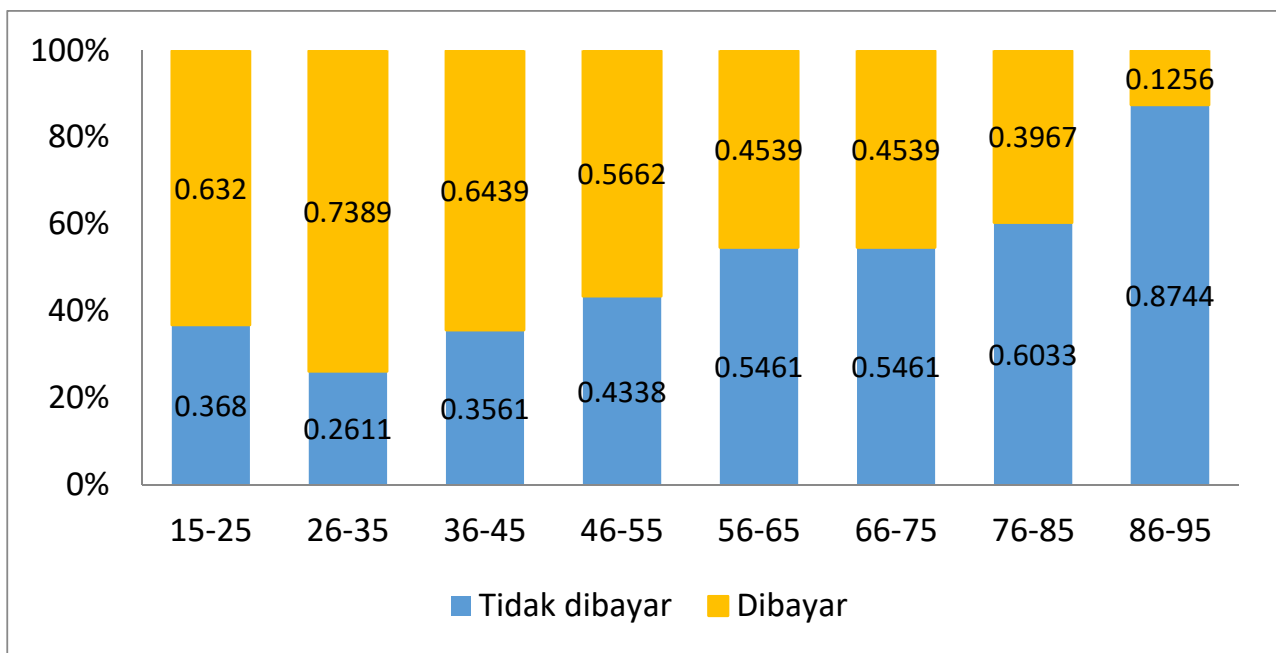
Berdasarkan jenis disabilitas, penyandang gangguan penglihatan memiliki probabilitas paling tinggi untuk dipekerjakan. Statistik ini sejalan dengan penelitian Bella & Dartanto (2016), yang menemukan bahwa PD dengan gangguan penglihatan cenderung tidak menjadi miskin. Tingginya persentase perekrutan untuk PD dengan gangguan penglihatan mungkin menjadi alasan temuan penelitian ini. Menurut penelitian ini, PD dengan gangguan penglihatan cenderung dipekerjakan karena mereka tidak terganggu oleh pandangan atau perlakuan orang lain yang meremehkan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada apa yang sedang mereka lakukan (Bella & Dartanto, 2016). PD dengan disabilitas majemuk memiliki persentase perekrutan terendah. Tiap jenis disabilitas akan membatasi kegiatan seseorang di bidang keterbatasan tertentu, sehingga penyandang lebih dari satu disabilitas cenderung memiliki lebih banyak keterbatasan kegiatan. Akibatnya, penyandang disabilitas majemuk cenderung tidak dipekerjakan, mengingat keterbatasan mereka.

Lampiran 20 dan 21 menunjukkan angka yang serupa dengan Gambar 5 untuk PD dengan disabilitas ringan dan berat. Di kalangan penyandang disabilitas ringan, penyandang gangguan penglihatan ringan memiliki persentase tertinggi untuk dipekerjakan, yaitu 69 persen. Tren ini mengikuti statistik PD sebelumnya. Sementara itu, di kalangan penyandang disabilitas berat, penyandang gangguan pendengaran berat memiliki persentase perekrutan tertinggi, yaitu 38 persen. Statistik ini sejalan dengan Yin & Shaewitz (2015) yang menemukan bahwa penyandang kesulitan penglihatan atau pendengaran di Amerika Serikat memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat perekrutan tertinggi pada tahun 2013.

## 2.4. Siapa yang Mendapatkan Upah Lebih Rendah?

Secara umum, PD mendapatkan upah per jam atau gaji bersih per bulan yang lebih rendah. Yang lebih buruk lagi, perhatian harus diberikan kepada PD pekerja tidak dibayar karena persentase PD tidak dibayar lebih tinggi daripada Non-PD tidak dibayar. Persentase penyandang disabilitas ringan dan berat yang tidak dibayar adalah sekitar 46 persen dan 50 persen, lebih tinggi dari persentase Non-PD tidak dibayar yang hanya sekitar 34 persen (lihat Lampiran 22).

**Gambar 6. Status Pembayaran PD seluruh usia**



Gambar 6 menunjukkan bahwa PD cenderung tidak dibayar seiring bertambahnya usia mereka. Ini mungkin terkait dengan meningkatnya prevalensi disabilitas seiring bertambahnya usia. Saat orang bertambah usia, probabilitas menjadi penyandang disabilitas akan meningkat. Akibatnya, mereka akan merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan, dan kemungkinan besar berakhir sebagai pekerja keluarga (tidak dibayar) atau pekerja tidak dibayar lainnya. Selanjutnya, persentase PD dibayar meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan (Lampiran 23). Seiring meningkatnya tingkat pendidikan, perusahaan cenderung lebih menghargai pekerja, dan akibatnya pekerja cenderung dibayar.

Tabel 6 menunjukkan upah bulanan rata-rata, jam kerja rata-rata, dan upah rata-rata per jam pekerja yang dibayar. Sebagaimana terlihat di Tabel 6, upah rata-rata penyandang disabilitas ringan adalah sekitar 14 persen lebih rendah daripada upah rata-rata Non-PD, sementara upah rata-rata penyandang disabilitas berat adalah sekitar 32 persen lebih rendah daripada upah rata-rata Non-PD. Menurut Yin & Shaewitz (2015), begitu PD memasuki angkatan kerja, mereka cenderung mendapatkan pekerjaan berupah rendah karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

**Tabel 5. Upah dan Jam Kerja Rata-rata**

Status Disabilitas	Upah Rata-rata/Bulan	Jam Kerja Rata-rata/Minggu	Upah Rata-rata/Jam
Non-PD	Rp. 1.873.564	42 jam/minggu	Rp. 11.146
PD Ringan	Rp. 1.615.231	35 jam/minggu	Rp. 11.447
PD Berat	Rp. 1.280.347	35 jam/minggu	Rp. 9.636
Rata-rata	Rp. 1.589.714	37 jam/minggu	Rp. 10.743

Sumber: Penghitungan Penulis

Dibandingkan dengan Non-PD, PD tidak hanya dihadapkan dengan pendapatan yang lebih rendah, tetapi juga rentan terhadap volatilitas pendapatan yang diakibatkan oleh metode pembayaran. PD cenderung mendapatkan bayaran berdasarkan keluaran atau secara harian, sedangkan persentase PD yang mendapatkan penghasilan secara bulanan jauh lebih rendah. Kondisi ini lebih buruk lagi bagi penyandang disabilitas berat (Lampiran 24). Sementara itu, penyandang disabilitas ringan dan berat yang dibayar bulanan jauh lebih rendah daripada Non-PD.

**Tabel 6. Sebaran Pendapatan PD dan Non-PD**

Rentang Pendapatan	Non-PD	PD-Ringan	PD-Berat
<750.000	21,65%	36,58%	42,07%
750.000 - <1.500.000	26,48%	23,29%	27,15%
1.500.000 - <2.500.000	29,66%	23,04%	22,01%
>=2.500.000	22,21%	17,09%	8,77%
Populasi	72.081.986	5.593.602	318.790

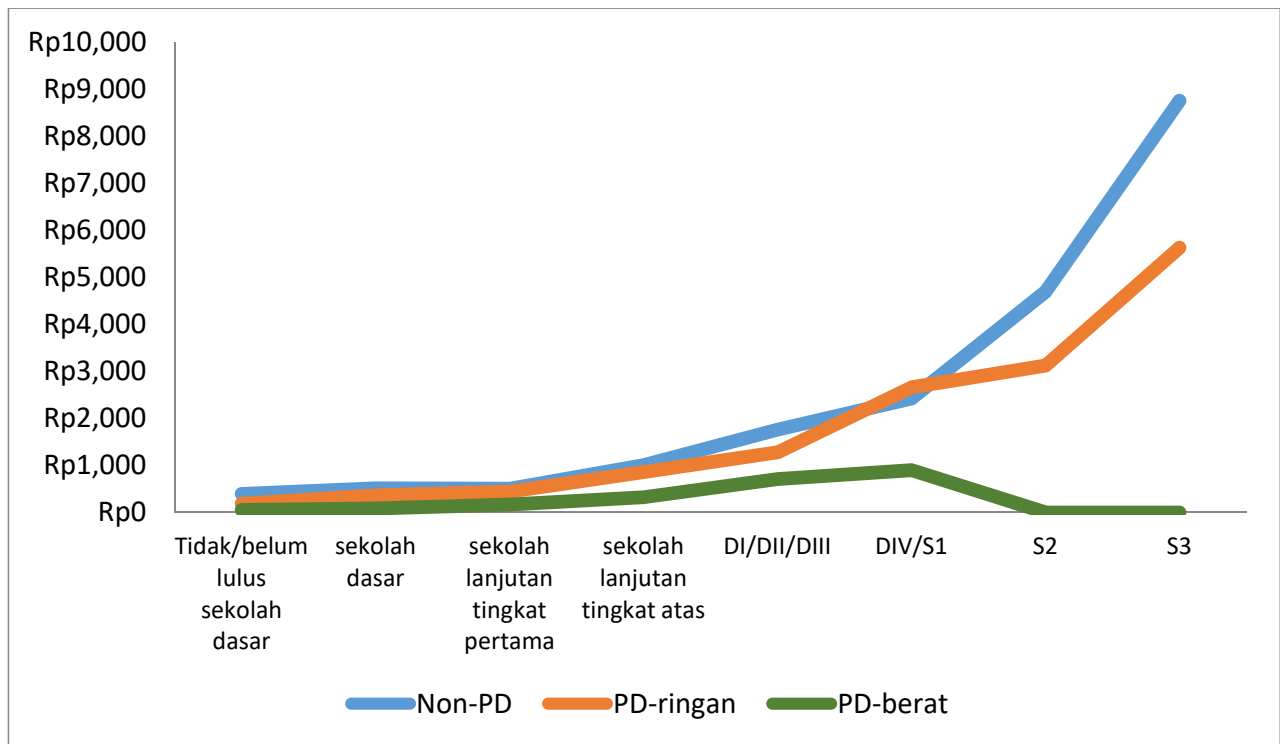
Sumber: Penghitungan Penulis

Tabel 6 di atas menunjukkan sebaran pendapatan Non-PD, PD dengan disabilitas ringan dan PD dengan disabilitas berat. PD yang memiliki pendapatan 25 persen terendah itu lebih tinggi dibandingkan Non-PD. Selain itu, PD dengan disabilitas berat yang memiliki pendapatan lebih rendah dari Rp 750.000 (kelompok penghasilan terendah) itu hampir dua kali lipat Non-PD yang memiliki pendapatan sama. Di sisi lain, PD yang memiliki pendapatan 25 persen tertinggi itu lebih rendah daripada Non-PD, mengingat PD dengan disabilitas berat yang termasuk dalam kelompok ini adalah sekitar 2,5 kali lebih rendah daripada Non-PD. Ini mungkin menunjukkan bahwa kesejahteraan PD kemungkinan lebih rendah dibandingkan Non-PD karena perbedaan pendapatan.

Gambar 7 menginformasikan upah rata-rata yang diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan. Garis yang digambarkan dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa orang memperoleh upah lebih banyak seiring meningkatnya tingkat pendidikan mereka. Pola ini berlaku untuk semua klasifikasi, termasuk penyandang disabilitas ringan, penyandang disabilitas berat dan non penyandang disabilitas. Seiring dengan pencapaian pendidikan, orang mendapatkan lebih banyak keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk menjadi

lebih produktif dan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Di gambar ini, kita bisa melihat bahwa kesenjangan antara pengembalian marginal pendidikan PD dan Non-PD semakin besar seiring semakin tingginya tingkat pendidikan. Ini mungkin merupakan indikasi bahwa diskriminasi upah terhadap PD masih ada bahkan di kalangan pekerja berketerampilan tinggi.

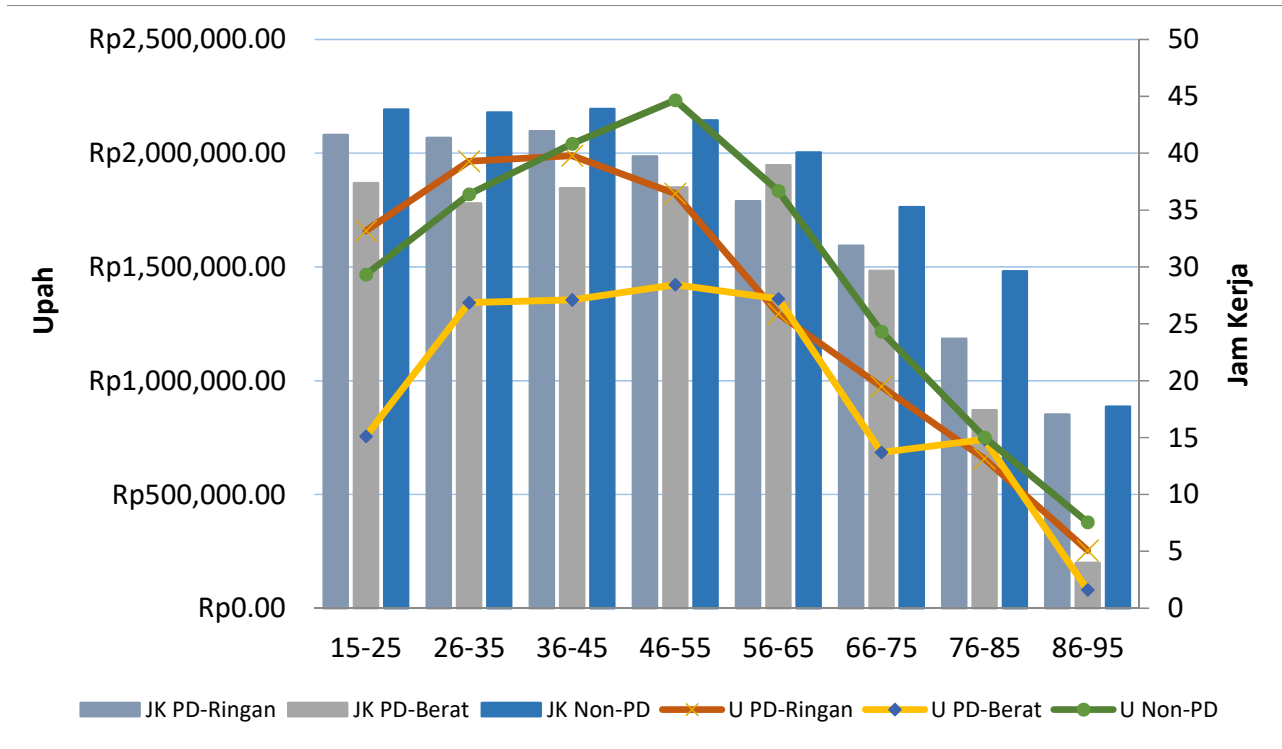
**Gambar 7. Upah Bulanan dan Tingkat Pendidikan (dalam ribuan)**



Namun, upah tambahan yang diperoleh seiring semakin banyaknya pendidikan yang dicapai tidak sama antara PD dan Non-PD. Untuk hampir semua tahap pendidikan, Non-PD rata-rata mendapat penghasilan lebih tinggi daripada PD. Kesenjangan ini bahkan semakin besar di sepanjang tahap atas pencapaian pendidikan. Keterampilan yang diperoleh oleh PD di lembaga pendidikan tidaklah sebaik yang dicapai oleh Non-PD. Penelitian lebih lanjut bisa dilakukan untuk mengkaji apakah diskriminasi upah terjadi antara PD dan Non-PD.

Di Gambar 8, data tabulasi usia menurut kelompok usia menggambarkan sebuah garis U-terbalik gaji seiring bertambahnya usia. Sampai usia tertentu, pekerja mendapatkan upah lebih banyak seiring meningkatnya produktivitas. Pola menurun tak terhindarkan saat penurunan jam kerja seiring bertambahnya usia terjadi. Namun, setelah titik penurunan, penyandang disabilitas berat mengalami kehilangan jam kerja tertinggi, yang menghasilkan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan lainnya. Meskipun pola upah berdasarkan usia cukup sama antara Non-PD dan PD, mereka dengan disabilitas, ringan atau berat, melaporkan jumlah upah yang sangat rendah dibandingkan dengan upah yang dilaporkan oleh Non-PD. Ini semakin buruk lagi bagi penyandang disabilitas berat. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa apakah disabilitas menyebabkan kesenjangan semacam ini.

**Gambar 8. Upah dan Jam Kerja Rata-rata menurut Kelompok Usia dan Status Disabilitas**



Upah mulai menurun drastis setelah usia 55. Ini berlaku untuk semua kecuali penyandang disabilitas berat. Upah mereka tetap sama dari usia 26 hingga 65 tahun.

## SIAPA YANG DIPEKERJAKAN? ANALISIS FAKTOR PENENTU PROBABILITAS PD DIPEKERJAKAN

**BUKAN** hanya persentase PD yang dipekerjakan saja yang rendah dibandingkan dengan populasi PD, tetapi jumlah PD yang memasuki pasar tenaga kerja juga terbatas. Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa PD memiliki persentase yang lebih rendah dalam angkatan kerja dan ketenagakerjaan, dibandingkan dengan Non-PD. Maka bagian ini akan mengonfirmasi fakta-fakta statistik yang telah dibahas sebelumnya, yaitu probabilitas memasuki angkatan kerja dan probabilitas dipekerjakan, dan hubungan antara tingkat disabilitas dengan probabilitas dipekerjakan.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan data Sakernas 2016 lintas bagian yang memuat pertanyaan tentang disabilitas untuk menganalisis kondisi penyandang disabilitas (PD) di pasar tenaga kerja Indonesia. Ada tiga sampel yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Keseluruhan sampel, yang berisi orang-orang di dalam dan di luar angkatan kerja sebanyak 131.339 pengamatan; 2) Angkatan kerja Indonesia (orang berusia 15 tahun ke atas) untuk 90.648 pengamatan; dan 3) PD dalam angkatan kerja untuk 9.945 pengamatan. Sampel 1, 2 dan 3 masing-masing digunakan untuk menganalisis probabilitas PD masuk ke dalam angkatan kerja, probabilitas PD dipekerjakan dan hubungan tingkat disabilitas dengan kemungkinan dipekerjakan.

Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Logistik (Logit) dengan dua variabel dependen biner untuk tiga model: 1) Kemungkinan masuk ke dalam angkatan kerja (1 untuk di angkatan kerja dan 0 untuk tidak di angkatan kerja); 2) Kemungkinan dipekerjakan (1 untuk dipekerjakan dan 0 untuk tidak dipekerjakan) dari semua sampel (PD dan Non-PD); dan 3) Kemungkinan dipekerjakan (1 untuk dipekerjakan dan 0 untuk tidak dipekerjakan) di kalangan PD. Variabel dependen pertama digunakan untuk model 1, sedangkan variabel dependen kedua digunakan untuk model 2 dan model 3. Tiga model estimasi dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$LF = \alpha + \beta \text{Disability\_Status} + \delta^i \text{SD\_Char} + \varepsilon \quad (1)$$

$$\text{Employment}_{\text{All}} = \alpha + \beta \text{Disability\_Status} + \delta^i \text{SD\_Char} + \varepsilon \quad (2)$$

$$\text{Employment}_{\text{Dis}} = \alpha + \beta_i \text{Disability\_Severity} + \delta^i \text{SD\_Char} + \varepsilon \quad (3)$$

Di mana:

- LF: Probabilitas masuk ke angkatan kerja (1 = dalam angkatan kerja; 0 = tidak dalam angkatan kerja);
- Disability\_Status: Status disabilitas (1 = menyandang disabilitas, 0 = tidak menyandang disabilitas);
- Employment<sub>All</sub>: Probabilitas dipekerjakan (1 = dipekerjakan; 0 = tidak dipekerjakan) untuk semua sampel (PD dan Non-PD);
- Employment<sub>Dis</sub>: Probabilitas dipekerjakan (1 = dipekerjakan; 0 = tidak dipekerjakan) untuk sampel PD;
- Disability\_Severity: Tingkat disabilitas, yaitu 1) menyandang satu disabilitas berat, 2) menyandang 1 disabilitas berat dan disabilitas majemuk ringan, 3) menyandang disabilitas majemuk berat dan 4) menyandang disabilitas majemuk ringan;
- SD\_Char: Karakteristik sosial dan demografi, yaitu usia, ukuran rumah tangga, lokasi, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, dan interaksi jenis kelamin-status perkawinan.
- $\varepsilon$ : Kesalahan

Di Sakernas 2016, orang ditanya tentang pendapat berkenaan dengan kondisi disabilitas mereka, dan jawabannya bisa “tidak”, “ya, ringan”, dan “ya, parah”. Kategori gangguan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

- ◆ Gangguan penglihatan
- ◆ Gangguan pendengaran
- ◆ Berjalan/menaiki tangga (mobilitas)
- ◆ Menggunakan/menggerakkan jari/tangan
- ◆ Berbicara/memahami/berkomunikasi dengan orang lain
- ◆ Lainnya (misalnya: mengingat, berkonsentrasi, gangguan emosi, perawatan diri, dll)



### 3.1. PD Memasuki Pasar Tenaga Kerja

Model pertama bertujuan untuk menganalisis probabilitas PD masuk ke dalam angkatan kerja. Karena statistik menunjukkan lebih rendahnya persentase PD dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan Non-PD, analisis pertama ini akan mengonfirmasi signifikansi fakta tersebut: apakah ada hubungan signifikan antara status disabilitas dan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja.

**Tabel 7. Dampak Marginal Model 1 – Probabilitas PD masuk ke dalam angkatan kerja**

VARIABEL	DAMPAK MARGINAL
<b>Status Disabilitas</b>	
Disabilitas (1=menyandang disabilitas & 0=tidak menyandang disabilitas)	-0,201***
<b>Variabel Sosial dan Demografi</b>	
Usia	0,0008***
Ukuran Rumah Tangga	-0,0108***
Lokasi (1=perdesaan & 0=perkotaan)	0,064***
Lulus sekolah dasar (1=ya & 0=tidak)	-0,038***
Lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (1=ya & 0=tidak)	-0,136***
Lulus sekolah lanjutan tingkat atas (1=ya & 0=tidak)	0,011***
Lulus perguruan tinggi (1=ya & 0=tidak)	0,160***
Jenis kelamin (1=perempuan & 0=laki-laki)	-0,112***
Status pernikahan (1=menikah & 0=lain-lain)	0,346***
Perempuan menikah (1=ya & 0=lain-lain)	-0,295***
<i>Observations</i>	131,339
<i>Pseudo R2</i>	0,0568
<i>chi2</i>	159,82
<i>prchi2</i>	0,0000

Kesalahan standar di dalam kurung; Signifikansi \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.10

Hasilnya menunjukkan bahwa status disabilitas berkorelasi negatif dengan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja. Disabilitas akan menurunkan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja sebesar 20,1 persen. Temuan ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya, yang memiliki temuan serupa misalnya Stephens (2011), Brown & Emery (2008), Campolieti (2002) dan Stern (1989).

Yin & Shaewitz (2015) menjelaskan fenomena ini dalam beberapa alasan berurutan. Pertama, penyandang disabilitas yang memasuki angkatan kerja cenderung mendapatkan pekerjaan berupah rendah karena rendahnya tingkat pendidikan mereka dibandingkan dengan Non-PD. Pekerjaan ini tidak memberikan kemajuan karier jangka panjang, tunjangan yang memadai, atau upah yang layak. Akibatnya, PD cenderung tidak memasuki angkatan

kerja karena biaya pencarian pekerjaan dan perawatan kesehatan mungkin lebih besar dibandingkan perkiraan manfaat dari pekerjaan.

Arlette (2012) menyatakan bahwa alasan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja untuk PD berasal dari sisi penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Di sisi penawaran, PD mungkin mengalami biaya kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan Non-PD, dan upah reservasi PD akan meningkat. Akibatnya, beberapa PD mungkin lebih memilih menganggur daripada bekerja. Kemungkinan lain adalah bahwa disabilitas meningkatkan usaha pencarian kerja, yang akan meningkatkan lamanya masa menganggur. Pada akhirnya, ini akan membuat PD kehilangan semangat dan keluar dari pasar tenaga kerja.

Di sisi permintaan, PD mungkin ditawari upah lebih rendah oleh perusahaan karena produktivitasnya lebih rendah. Upah yang lebih rendah ini mungkin lebih rendah dari upah reservasi mereka, dan sebagian PD lebih memilih menganggur. Faktor sisi permintaan lainnya adalah karakteristik yang tidak teramati, misalnya diskriminasi. Diskriminasi mungkin muncul ketika PD dan Non-PD memiliki produktivitas yang sama, namun PD pada akhirnya memiliki upah atau kesempatan kerja yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan PD kehilangan semangat untuk memasuki angkatan kerja.

### 3.2. Probabilitas PD Dipekerjakan

Model kedua terfokus pada sampel orang-orang yang telah memasuki pasar tenaga kerja. Model ini bertujuan untuk menemukan dampak disabilitas terhadap probabilitas dipekerjakan, yang dikendalikan oleh variabel sosial dan demografis.

Hasilnya jelas menunjukkan hubungan negatif antara status disabilitas dan kesempatan mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja Indonesia. Hasil ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bukti bahwa tingkat perekrutan untuk PD jauh lebih rendah daripada Non-PD (Jones, 2008; Metts, 2000; WHO, 2011).

**Tabel 8. Dampak Marginal Model 2 – Probabilitas PD Dipekerjakan  
(dari semua sampel)**

VARIABEL	DAMPAK MARGINAL
<b>Status Disabilitas</b>	
Disabilitas (1=menyandang disabilitas & 0=tidak menyandang disabilitas)	-0,0229***
<b>Variabel Sosial dan Demografi</b>	
<i>Usia</i>	0,0018***
<i>Ukuran Rumah Tangga</i>	-0,0023***
<i>Lokasi (1=perdesaan &amp; 0=perkotaan)</i>	0,0118***
<i>Lulus sekolah dasar (1=ya &amp; 0=tidak)</i>	-0,0001
<i>Lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (1=ya &amp; 0=tidak)</i>	0,0013

VARIABEL	DAMPAK MARGINAL
<i>Lulus sekolah lanjutan tingkat atas (1=ya &amp; 0=tidak)</i>	-0,0138 ***
<i>Lulus perguruan tinggi (1=ya &amp; 0=tidak)</i>	-0,014***
<i>Jenis kelamin (1=perempuan &amp; 0=laki-laki)</i>	0,0013
<i>Status pernikahan (1=menikah &amp; 0=lain-lain)</i>	0,054***
<i>Perempuan menikah (1=ya &amp; 0=lain-lain)</i>	0,0003
<i>Observations</i>	90,648
<i>Pseudo R2</i>	0,1520
<i>chi2</i>	4,011,99
<i>prchi2</i>	0,0000

Kesalahan standar di dalam kurung; Signifikansi \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.10

PD lebih kecil kemungkinannya, sebesar 1,9 persen, untuk memiliki pekerjaan daripada Non-PD. Di satu sisi, PD jelas tidak bisa mengisi setiap jenis pekerjaan yang bisa ditawarkan kepada Non-PD. Dengan sempitnya bidang kerja, PD kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka mungkin juga kurang memiliki jaringan sosial efektif yang bisa memandu mereka dalam tantangan pasar tenaga kerja (Potts, 2005).

Di sisi lain, perusahaan mungkin menghindari mempekerjakan PD. Pandangan ini didukung oleh Kaye et al. (2011) yang menemukan bahwa pengusaha menyampaikan keengganan mempekerjakan PD karena beberapa alasan, termasuk kurangnya kesadaran tentang disabilitas dan kekhawatiran akan akomodasi, isu terkait biaya dan kewajiban hukum.

### 3.3. PD Mana yang Dipekerjakan?

Model ketiga ini bertujuan untuk menemukan jenis disabilitas mana yang memiliki peluang terbaik atau terburuk untuk mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja Indonesia. Sampel data yang digunakan di sini hanya mewakili penyandang disabilitas. Dalam model ini disabilitas dikategorikan ke dalam empat jenis: disabilitas berat tunggal, disabilitas berat dan ringan, disabilitas majemuk berat dan disabilitas majemuk ringan. Semua jenis itu digunakan sebagai variabel independen, yang menentukan apakah orang tersebut mendapat pekerjaan di pasar tenaga kerja. Sama seperti model sebelumnya, model ini juga dikontrol dengan variabel sosial dan demografi.

Hasil di atas menunjukkan bahwa probabilitas mendapatkan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh status disabilitas. Ini mendukung temuan sebelumnya bahwa PD memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja Indonesia. Hubungan negatif ini berlaku untuk semua jenis disabilitas berdasarkan tingkat keparahan, termasuk disabilitas berat tunggal, disabilitas ringan dan berat, disabilitas majemuk ringan dan disabilitas majemuk berat. Hasil tersebut dikendalikan dengan variabel sosial dan demografi yang juga memiliki koefisien signifikan.

Orang yang menunjukkan disabilitas berat tunggal 2,7 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan daripada yang lain. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menunjukkan disabilitas majemuk ringan yang hanya 1,2 persen. Sementara itu, orang yang memiliki disabilitas ringan dan berat 0,9 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan daripada yang lain; dan yang lebih buruk lagi, mereka yang melaporkan disabilitas majemuk berat 49,4 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan memainkan peran penting dalam menentukan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin berat disabilitas, semakin buruk dampak negatif disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

**Tabel 9. Dampak Marginal Model 3 – Probabilitas PD Dipekerjakan (di antara PD)**

VARIABEL	DAMPAK MARGINAL
<b>Karakteristik Disabilitas</b>	
Disabilitas berat tunggal (1=ya & 0=tidak)	-0,0222***
Disabilitas ringan dan berat (1=ya & 0=tidak)	-0,0222***
Disabilitas berat majemuk (1=ya & 0=tidak)	-0,037***
Disabilitas ringan majemuk (1=ya & 0=tidak)	-0,006*
<b>Variabel Sosial dan Demografi</b>	
Usia	0,0006***
Ukuran Rumah Tangga	-0,0005
Lokasi (1=perdesaan & 0=perkotaan)	0,0223***
Lulus sekolah dasar (1=ya & 0=tidak)	0,0014
Lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (1=ya & 0=tidak)	-0,0045
Lulus sekolah lanjutan tingkat atas (1=ya & 0=tidak)	0,0053
Lulus perguruan tinggi (1=ya & 0=tidak)	0,0152***
Jenis kelamin (1=perempuan & 0=laki-laki)	0,007
Status pernikahan (1=menikah & 0=lain-lain)	0,0239***
Perempuan menikah (1=ya & 0=lain-lain)	-0,0007
<i>Observations</i>	9,945
<i>Pseudo R2</i>	0,0568
<i>chi2</i>	159,82
<i>prchi2</i>	0,0000

Kesalahan standar di dalam kurung; Signifikansi \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.10

Hasil studi ini mengindikasikan bahwa disabilitas berat bisa membatasi individu, dalam kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan disabilitas ringan dan bahkan non-disabilitas, untuk memegang tanggung jawab tertentu di perusahaan. Perusahaan mungkin menolak mempekerjakan penyandang disabilitas berat sebagai upaya menghindari biaya tambahan dari mempekerjakan mereka. Implikasi yang lebih luas dari temuan ini adalah bahwa perlindungan harus ditujukan secara khusus kepada mereka yang menyandang disabilitas berat tanpa mengabaikan disabilitas ringan. Merupakan sebuah ironi bahwa orang-orang yang benar-benar membutuhkan pada kenyataannya mendapatkan lebih sedikit kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.



**BELUM** banyak penelitian tentang PD dan pasar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan situasi PD dalam menghadapi pasar tenaga kerja. Di awal, penelitian ini membandingkan beberapa sumber data tentang PD di mana masing-masing memiliki pengukuran disabilitas yang berbeda. Akibatnya, ada keragaman tentang prevalensi disabilitas di Indonesia dari berbagai sumber data berbeda, yang berkisar antara 1 hingga lebih dari 12 persen. Data disabilitas yang berbeda ini cenderung mempersulit perbandingan kondisi disabilitas antara Indonesia dan negara-negara lain. Dalam hal prevalensi disabilitas di Indonesia dari Sakernas 2016, perlu lebih memperhatikan disabilitas di beberapa bagian timur Indonesia dan bagian barat Sumatera.

Implikasi terhadap PD dari segi gender, pendidikan dan ketenagakerjaan memerlukan studi selanjutnya. Seperti diperlihatkan berbagai penelitian, lebih banyak PD perempuan dibandingkan laki-laki. Partisipasi sekolah PD juga jauh lebih rendah dibandingkan Non-PD. Pemerintah perlu memprioritaskan pendidikan bagi PD karena menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi untuk mendapatkan kemampuan kerja dan dipekerjakan, terutama di sektor formal. Selanjutnya tingkat angkatan kerja PD masih lebih sedikit dibandingkan Non-PD. Ini merupakan indikasi tingginya tingkat keputusasaan di antara PD. Ini juga terkait dengan tingginya angka PD yang memilih melakukan kegiatan lain (bukan rumah tangga dan bukan bersekolah) dibandingkan bekerja. Mempertimbangkan sektor dan status pekerjaan, PD cenderung memiliki status pekerjaan informal: sektor pertanian, wiraswasta, pekerjaan berbasis rumah, daerah perdesaan dan pencarian kerja informal.

Di kalangan populasi pekerja, jumlah PD tidak dibayar lebih tinggi daripada Non-PD. Kesenjangan upah di antara PD dan Non-PD juga masih terjadi, yang terlihat dari tingginya persentase PD dengan disabilitas ringan yang memiliki pekerjaan sampingan. Namun, diperlukan lagi sebuah penelitian lain untuk menggali alasan perbedaan upah ini. Dalam hal fasilitas kerja, PD cenderung memiliki persentase yang lebih rendah dalam mendapatkan fasilitas/jaminan kerja.

Berdasarkan penelitian ini, ada kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi PD dalam angkatan kerja. Memperbesar pasar tenaga kerja bagi PD dapat menjawab kebutuhan tersebut. Kami merekomendasikan tiga cara untuk memperbesar pasar tenaga kerja untuk PD:

- 1) Pembentukan saluran formal untuk melamar pekerjaan bagi PD.
- 2) Peningkatan teknologi untuk membantu PD.
- 3) Penyebarluasan tawaran pekerjaan untuk PD kepada masyarakat umum.

Peningkatan teknologi untuk membantu PD bisa dilakukan dengan menyediakan akomodasi/alat bantu disabilitas untuk masing-masing jenis PD. Pemerintah dapat mengambil peran dalam masalah ini dengan menyediakan alat bantu disabilitas yang lebih murah melalui subsidi atau peraturan lain. Pembukaan tawaran pekerjaan untuk PD bisa dilakukan melalui sarana fasilitasi PD di setiap bursa kerja atau penyelenggaraan bursa kerja khusus untuk PD. Agar ketiga langkah ini bisa berjalan dan berhasil, pemerintah harus menjadi penggerak pertama untuk melakukan langkah-langkah tersebut yang kemudian dapat ditiru pihak-pihak lain.

Ketiga cara untuk meningkatkan partisipasi PD dalam angkatan kerja ini dapat dilakukan dari sisi permintaan dan sisi penawaran pasar tenaga kerja. Dari sisi permintaan, ada kebutuhan untuk mensosialisasikan peraturan ketenagakerjaan terkait disabilitas di Indonesia, terutama setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan swasta untuk memiliki sekurang-kurangnya 1 persen PD sebagai pekerja mereka. Selain itu, pemerintah juga harus mensosialisasikan sanksi bagi yang tidak mempekerjakan PD, sehingga perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak PD. Kedua, pemerintah juga bisa menetapkan perusahaan-perusahaan terbaik sebagai panutan bagi perusahaan lain untuk mempekerjakan PD. Berkenaan dengan penetapan ini, pemerintah dan perusahaan milik negara harus menjadi penggerak pertama agar menjadi panutan dengan memiliki sekurang-kurangnya 2 persen PD sebagai pekerja mereka. Ketiga, peraturan tentang pekerja penyandang disabilitas juga bisa mendorong perusahaan mempekerjakan PD dengan memberikan insentif.

Dari sisi penawaran, ada kebutuhan untuk memperhatikan pekerja penyandang disabilitas. Pertama, keterampilan teknis dan sosial PD harus ditingkatkan. Karena perusahaan mungkin melihat PD sebagai pelamar yang inferior, PD harus memiliki keterampilan yang cukup untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan bekerja dengan baik dalam pekerjaan mereka. Kedua, PD harus mendapat informasi tentang tawaran pekerjaan untuk PD melalui jalur formal. Terakhir, PD harus bekerja sama dan membentuk komunitas untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar tenaga kerja.



## REFERENCES

- Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto. (2014). *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*. Depok. Retrieved from <http://www.tnp2k.go.id/en/download/persons-with-disabilities-in-indonesia-empirical-facts-and-implications-for-social-protection-policies/>
- Arlette, S. F. (2012). Disability and labour force participation in Cameroon. *African Economic Conference (page. 1)*. African Economic Conference.
- Baldwin, M., & Johnson, W. G. (2015). Labor Market Discrimination against Men with Disabilities. *The Journal of Human Resources*, 29(1), 1–19.
- Baldwin, M. L., Zeager, L. A., & Flacco, P. R. (1994). Gender Differences in Wage Losses from Impairments : Estimates from the Survey of Income and Program Participation. *The Journal of Human Resources*, 29(3), 865–887.
- Bella, A., & Dartanto, T. (2016). A Bad Luck: People with Disabilities (PWD) and Poverty in Indonesia. Jakarta: LPEM FEB UI Working Paper No.005
- Brown, C. L., & Emery, J. C. H. (2008). The Impact of Disability on Earnings and Labour Force Participation in Canada : Evidence from the 2001 PALS. *Journal of Legal Economics*, 10(2), 19–59.
- Campolieti, M. (2002). Disability and the labor force participation of older men in Canada. *Labour Economics*, 9(3), 405–432.
- Cook, J. A. (2006). Employment Barriers for Persons with Psychiatric Disabilities: Update of a Report for the President's Commission. *Psychiatric Services*, 57(10), 1391–1405. <http://doi.org/10.1176/appi.ps.57.10.1391>
- Elwan, A. (1999). Copy file, (9932).
- Halimatussadiyah, A., Agriva, M., & Nuryakin, C. (2015). *Persons with Disabilities (PWD) and Labor Force in Indonesia : A Preliminary Study* (LPEM-FEUI No. 003). Jakarta.
- Hollenbeck, K., & Kimmel, J. (2008). Differences in the Returns to Education for Males by Disability Status and Age of Disability Onset. *Southern Economic Journal*, 74(3), 707–724. <http://doi.org/10.2307/20111992>

- International Labor Organization. (2013). Inclusion of Persons with Disabilities. International Labor Organization.
- Jones, M. K. (2008). Disability and the labour market : a review of the empirical evidence. *Journal of Economic Studies*, 35(5), 405–424. <http://doi.org/10.1108/01443580810903554>
- Jones, M., Mavromaras, K., Sloane, P., & Wei, Z. (2011). *Disability and Job Mismatches in the Australian Labour Market* (Discussion Paper No. 6152).
- Kaye, H. S., Jans, L. H., & Jones, E. C. (2011). Why don't employers hire and retain workers with disabilities? *Journal of Occupational Rehabilitation*, 21(4), 526–536. <http://doi.org/10.1007/s10926-011-9302-8>
- Kemenkes. (2013). *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Kementerian Sosial RI. (2011). *Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Lamichhane, K., & Kawakatsu, Y. (2015). Disability and determinants of schooling: A case from Bangladesh. *International Journal of Educational Development*, 98-105.
- Loprest, P. (2001). *Barriers to and Supports for Work among Adult with DisabilitiesL: Result from the NHIS-D*.
- Loprest, P., Rupp, K., & Sandell, S. H. (2016). Gender , Disabilities , and Employment in the Health and Retirement Study. *The Journal of Human Resources*, 30(1995).
- Mavromaras, K., Oguzoglu, U., Black, D., & Wilkins, R. (2007). *Disability and Employment in the Australian Labour Market*. Melbourne: Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research.
- Metts, R. L. (2000). *Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank* (Social Protection Discussion Paper No. 7). Washington D.C.
- Mitra, S. (2005). *Disability and Social Safety Nets in Developing Countries* (Social Protection Discussion Paper No. 0509). Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2330481>
- Mitra, S. (2013). Is There a Disability Gap in Employment Rates in Developing Countries ? *World Development*, 42(March 2012), 28–43. <http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.037>
- Mitra, S., & Vick, B. (2013). Disability and Poverty in Developing Countries : A Multidimensional Study. *World Development*, 41, 1–18. <http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.024>
- Oguzoglu, U. (2009). *Severity of Work Disability and Work*. Bonn: IZA.
- Potts, B. (2005). Disability and Employment : Considering the Inportance of Social Capital. *Journal of Rehabilitation*, 71(3), 20–25.
- Stephens, B. J. (2011). *The Determinants of Labour Force Status among Indigenous Australians*. The University of Western Australia.
- Stern, S. (1989). Measuring the Effect of Disability on Labor Force Participation. *The Journal of Human Resources*, Vol. 24, No. 3, 361-395.

WHO. (2011). World Report on Disability 2011. *American Journal of Physical Medicine Rehabilitation Association of Academic Physiatrists*, 91, 549. <http://doi.org/10.1136/ip.2007.018143>.

Yeo, R., & Moore, K. (2003). Including Disabled People in Poverty Reduction Work: “Nothing About Us, Without Us”. *World Development Vol. 31, No. 3*, pp. 571–590.

Yeo, R., & Road, V. (2001). *Chronic Poverty and Disability* (Background Paper No. 4).

Yin, M., & Shaewitz, D. (2015). *One Size Does Not Fit All: A New Look at the Labor Force Participation of People With Disabilities*. Washington DC: American Institutes for Research.

Zaidi, A., & Burchardt, T. (2003). *Comparing Incomes When needs Differ: Equivalisation for the Extra Costs of Disability in the UK*. London: London School of Economics (Centre for Analysis of Social Exclusion).

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1: Pertanyaan Disabilitas Masing-Masing Kegiatan Pengumpulan Data

#### a) Sensus Penduduk 2010

	1. Tidak	2. Sedikit	3. Parah
Apakah ( <i>NAMA</i> ) mempunyai kesulitan:			
a. Melihat, meskipun pakai kaca mata?...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b. Mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c. Berjalan atau naik tangga?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d. Mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e. Mengurus diri sendiri?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### b) Susenas 2012

##### Apakah mengalami gangguan fungsi keterbatasan/disabilitas (cacat) dalam hal:

Melihat, meskipun pakai kaca mata (misal penglihatan kurang jelas (low vision), buta warna, buta total, dll.)	Mendengar meskipun pakai alat bantu pendengaran (misal, tuna rungu, dll)	Berkomunikasi dengan orang lain (misal, tuna wicara, dll)	Mengingat atau berkonsentrasi (misal, autis, mental/retardasi, kejiwaan, dll)	Berjalan atau naik tangga (misal, lumpuh/layuh, kaki kecil, pendek sebelah, dll)	Mengurus diri sendiri (misal, makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dll)
1. Ya, ringan 2. Ya, berat 3. Tidak	1. Ya, ringan 2. Ya, berat 3. Tidak	1. Ya, ringan 2. Ya, berat 3. Tidak	1. Ya, ringan 2. Ya, berat 3. Tidak	1. Ya, ringan 2. Ya, berat 3. Tidak	1. Ya, ringan 2. Ya, berat 3. Tidak

**c) Riskesdas 2013**

	Tidak Ada	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat
1. Sulit berdiri dalam waktu lama misalnya 30 menit?	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
2. Sulit mengerjakan kegiatan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
3. Sulit mempelajari/mengerjakan hal-hal baru, seperti untuk menemukan tempat/alamat baru, mempelajari permainan, resep baru	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
4. Sulit dapat berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan (misalnya dalam kegiatan keagamaan, sosial)	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
5. Seberapa besar masalah kesehatan yang dialami mempengaruhi keadaan emosi?	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
6. Seberapa sulit memusatkan pikiran dalam melakukan sesuatu selama 10 menit?	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
7. Seberapa sulit dapat berjalan jarak jauh misalnya 1 kilometer?	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
8. Seberapa sulit membersihkan seluruh tubuh?	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
9. Seberapa sulit mengenakan pakaian?	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
10. Seberapa sulit berinteraksi/bergaul dengan orang yang belum dikenal sebelumnya?	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
11. Seberapa sulit memelihara persahabatan?	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
12. Seberapa sulit mengerjakan pekerjaan sehari-hari?	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9

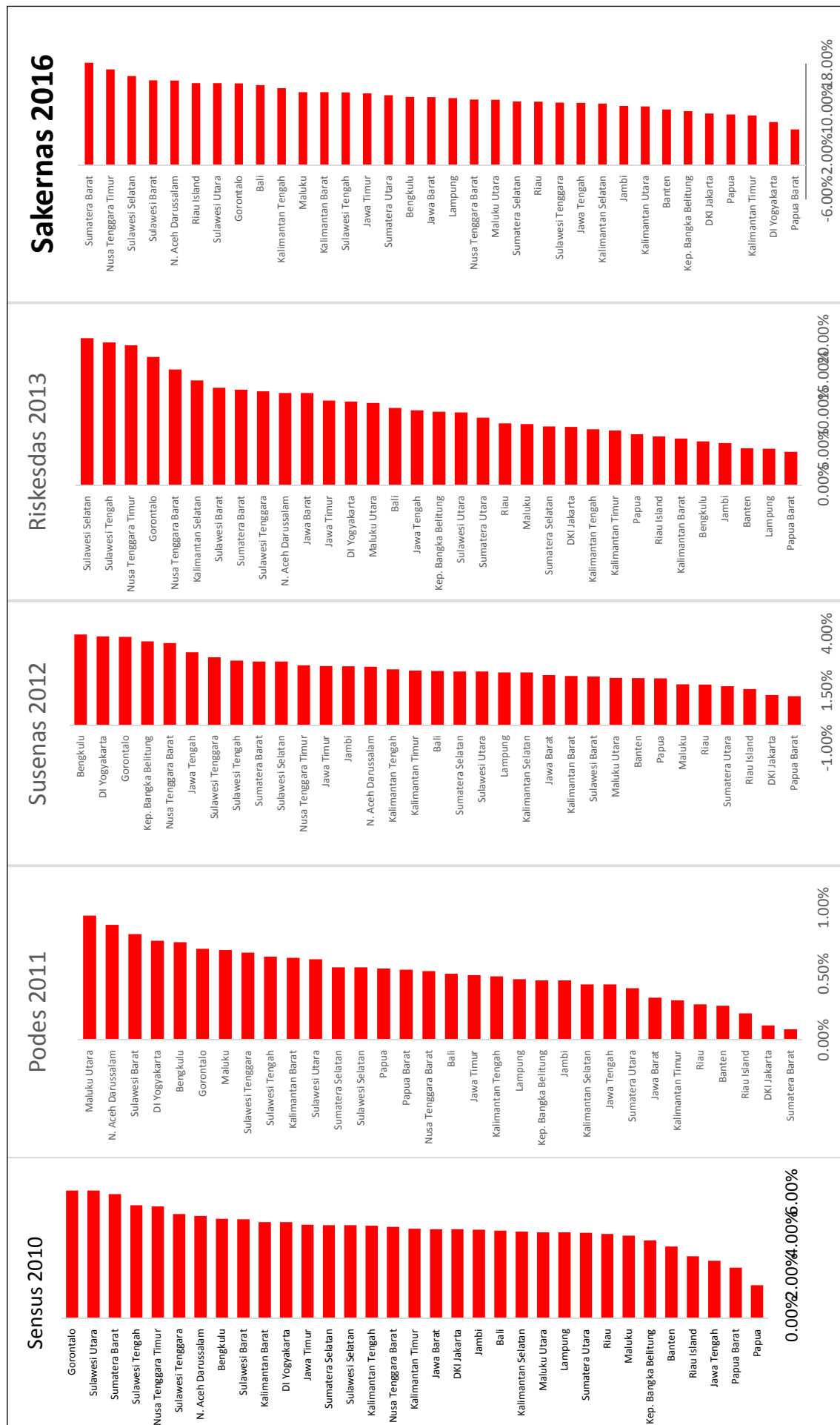
**d) Podes 2014**

<b>Banyaknya penyandang cacat di desa/kelurahan:</b>	
<b>Jenis kecacatan</b>	<b>Perkiraan banyaknya penyandang cacat</b>
a. Tunanetra (buta)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
b. Tunarungu (tuli)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
c. Tunawicara (bisu)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
d. Tunarungu-wicara (tuli-bisu)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
e. Tunadaksa (cacat tubuh/fisik): kelumpuhan/kelainan/ketidaklengkapan anggota gerak	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
f. Tunagrahita (cacat mental, keterbelakangan mental)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
g. Tunalaras (eks-sakit jiwa, mengalami hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
h. Cacat eks-sakit kusta: pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
i. Cacat ganda (cacat fisik-mental): cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli, atau cacat tubuh) dan cacat mental (tunagrahita atau tunalaras)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

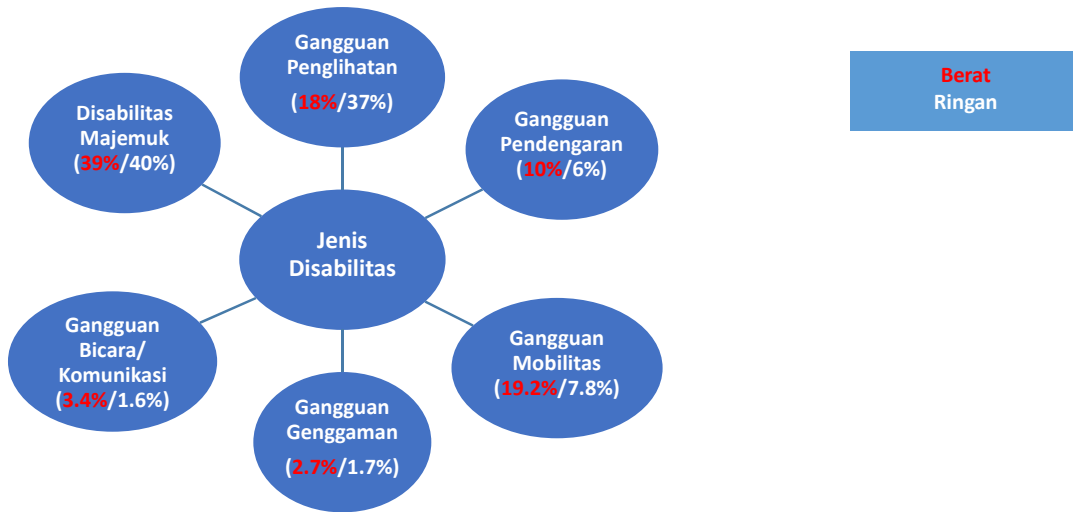
**e) Sakernas 2016**

4. Apakah (NAMA) mengalami kesulitan/gangguan:			
	TIDAK	SEDIKIT/SEDANG	PARAH
a. Penglihatan	1	2	3
b. Pendengaran	4	5	6
c. Berjalan/naik tangga (mobilitas)	1	2	3
d. Menggunakan/menggerakkan jari/tangan	4	5	6
e. Berbicara dan atau memahami/ berkomunikasi dengan orang lain	1	2	3
f. Lainnya (misalnya: mengingat/konsentrasi, perilaku/emosional, mengurus diri, dan lain-lain)	4	5	6

## 2. Lampiran 2: Prevalensi Disabilitas di Seluruh Provinsi di Lima Sumber Data Disabilitas



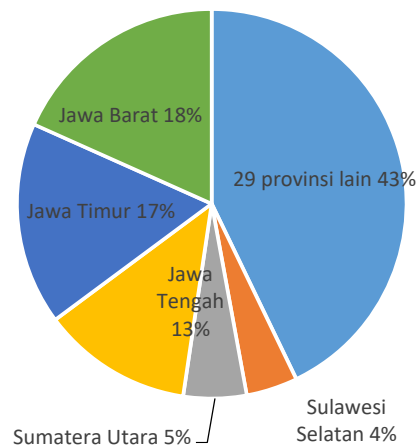
### 3. Lampiran 3: Kategori Gangguan



### 4. Lampiran 4: Prevalensi Disabilitas di Seluruh Kawasan

Kawasan	Prevalensi Disabilitas		
	Ringan	Berat	Total
Sumatera	10,88%	1,92%	12,80%
Jawa/Bali	9,86%	1,79%	11,65%
Kalimantan	9,82%	1,74%	11,56%
Sulawesi	12,11%	2,43%	14,54%
NT	12,10%	2,30%	14,40%
Maluku	10,47%	1,99%	12,46%
Papua	7,87%	0,62%	8,49%
Indonesia	10,29%	1,87%	12,15%

### 5. Lampiran 5: Sebaran PD di Seluruh Provinsi Indonesia





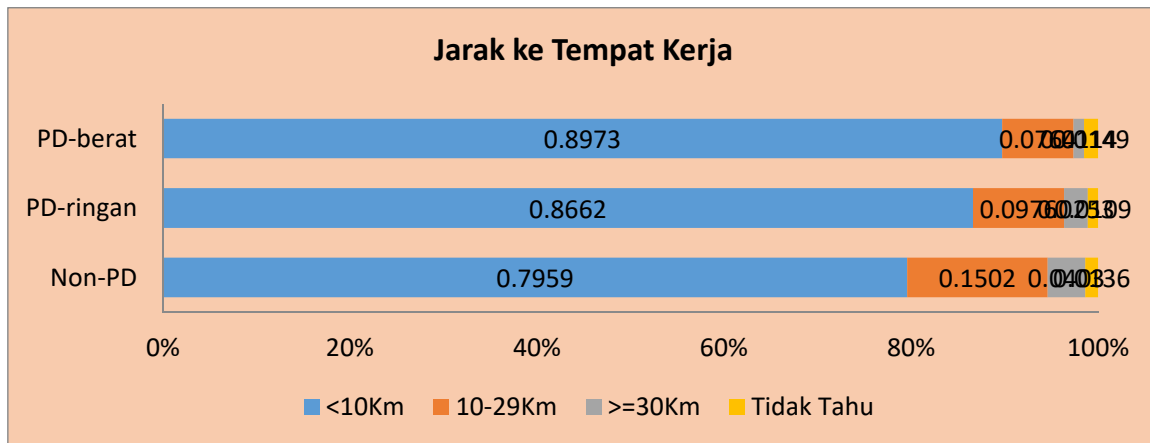
## 6. Lampiran 6: Sektor Pekerjaan

Sektor Pekerjaan	PD-ringan	PD-berat	PD	Non-PD
Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	46,10%	44,76%	46,01%	29,51%
Pertambangan	4,52%	3,72%	4,47%	6,46%
Industri	5,07%	5,69%	5,11%	7,31%
Kelistrikan, bahan bakar, air minum	3,83%	2,86%	3,77%	6,26%
Konstruksi	19,14%	17,47%	19,04%	21,87%
Perkulakan, restoran, akomodasi	5,20%	5,09%	5,19%	5,51%
Transportasi, pergudangan, komunikasi	0,58%	0,00%	0,55%	1,70%
Keuangan, perumahan, persewaan, jasa usaha	0,58%	0,61%	0,58%	0,77%
Layanan sosial, sosial, dan individual	11,33%	10,16%	11,26%	14,95%
Lain-lain	3,67%	9,63%	4,03%	5,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

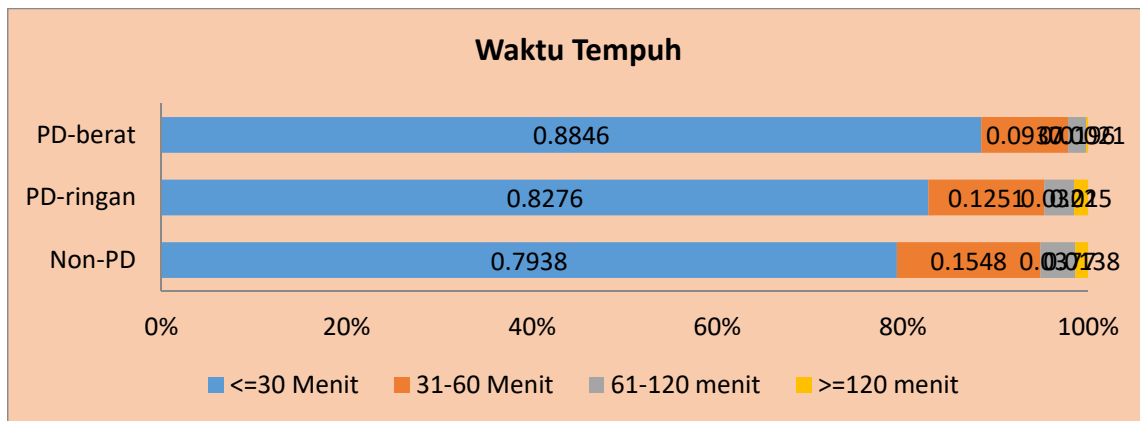
## 7. Lampiran 7: Matriks Definisi Status Pekerjaan Formal/Informal

Jenis Pekerjaan/ Status Pekerjaan	Anggota legislatif, pejabat senior, manajer	Ahli profesional	Teknisi dan asisten profesional	Pekerja dukung klerikal	Pekerja jasa dan penjualan	Pekerja pertanian dan peternakan	Pekerja pengolahan dan kerajinan	Operator mesin dan perakitan	Pekerja tidak terampil, penjaga, dan pekerjaan dasar lain	Tentara (TNI) dan polisi (POLRI)
Wiraswasta	Formal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal
Wiraswasta dengan pekerja sementara/tidak dibayar	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Informal	Formal	Formal	Formal	Informal
Wiraswasta dengan anggota tetap/dibayar	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal
Karyawan	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal
Pekerja tidak tetap di pertanian	Formal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal
Pekerja tidak tetap di non pertanian	Formal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal
Pekerja tidak dibayar/keluarga	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal	Informal

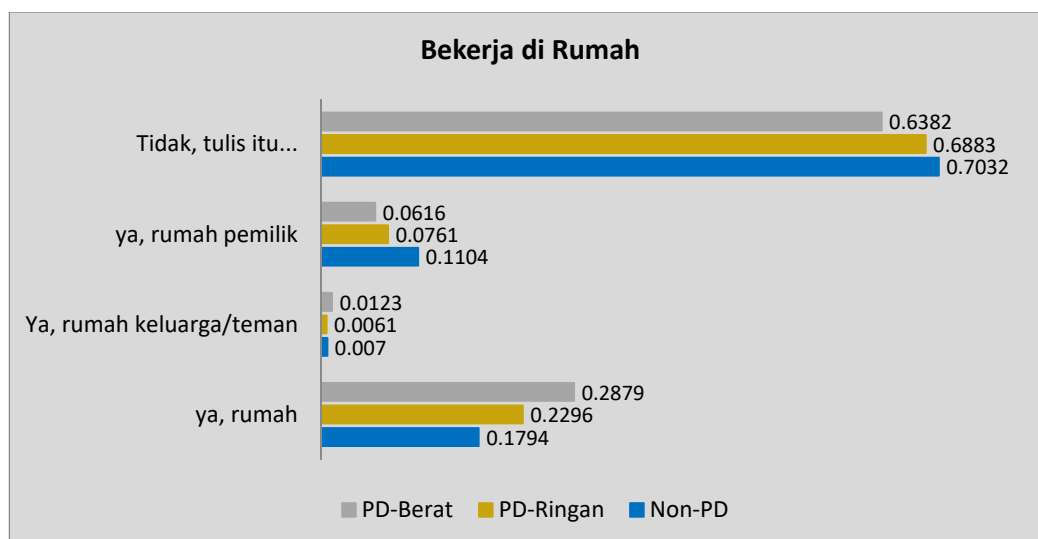
## 8. Lampiran 8: Jarak ke Tempat Kerja



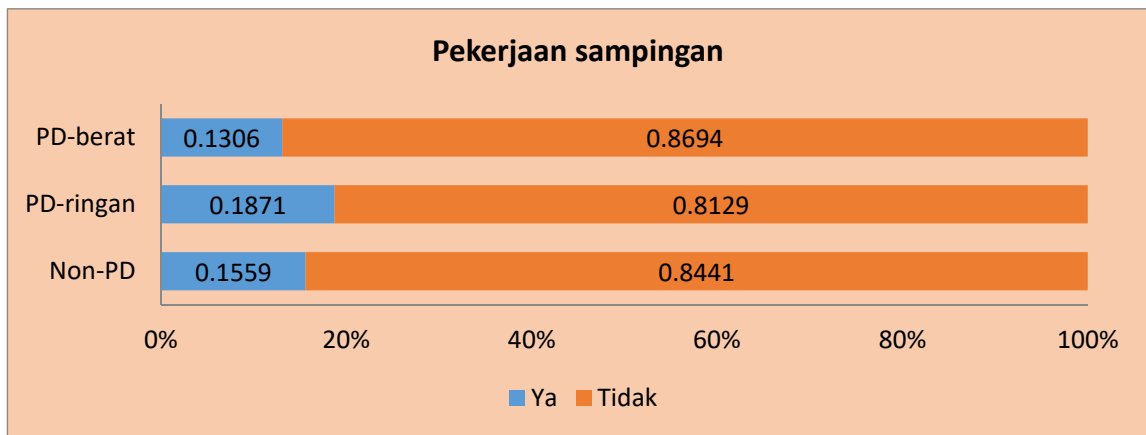
## 9. Lampiran 9: Waktu ke Tempat Kerja



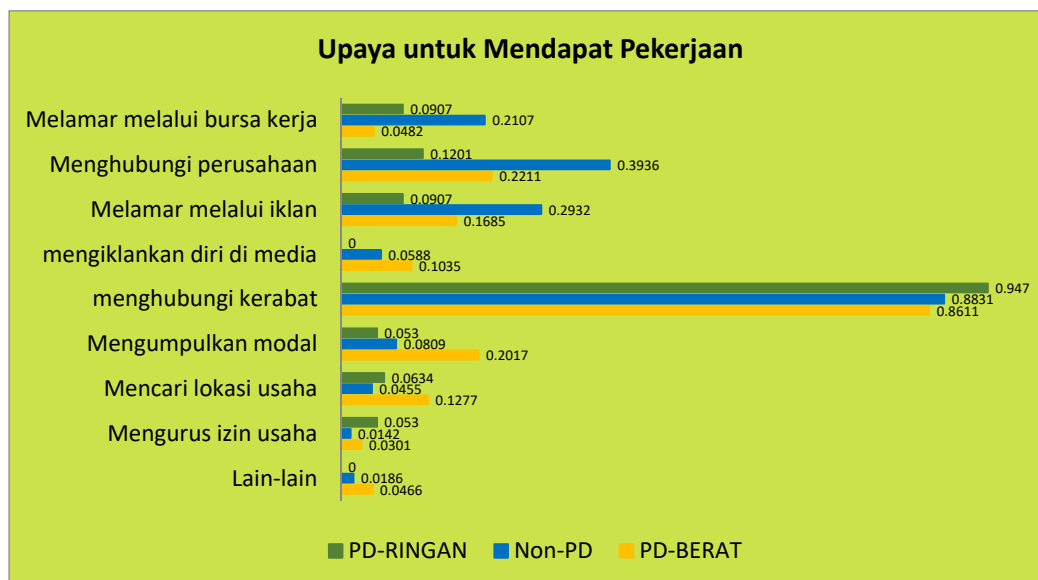
## 10. Lampiran 10: Bekerja di Rumah



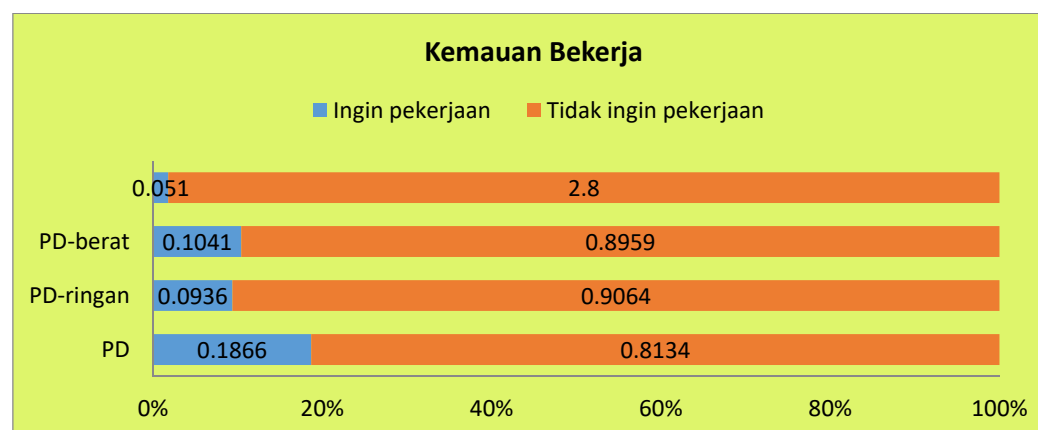
## 11. Lampiran 11: Pekerjaan sampingan



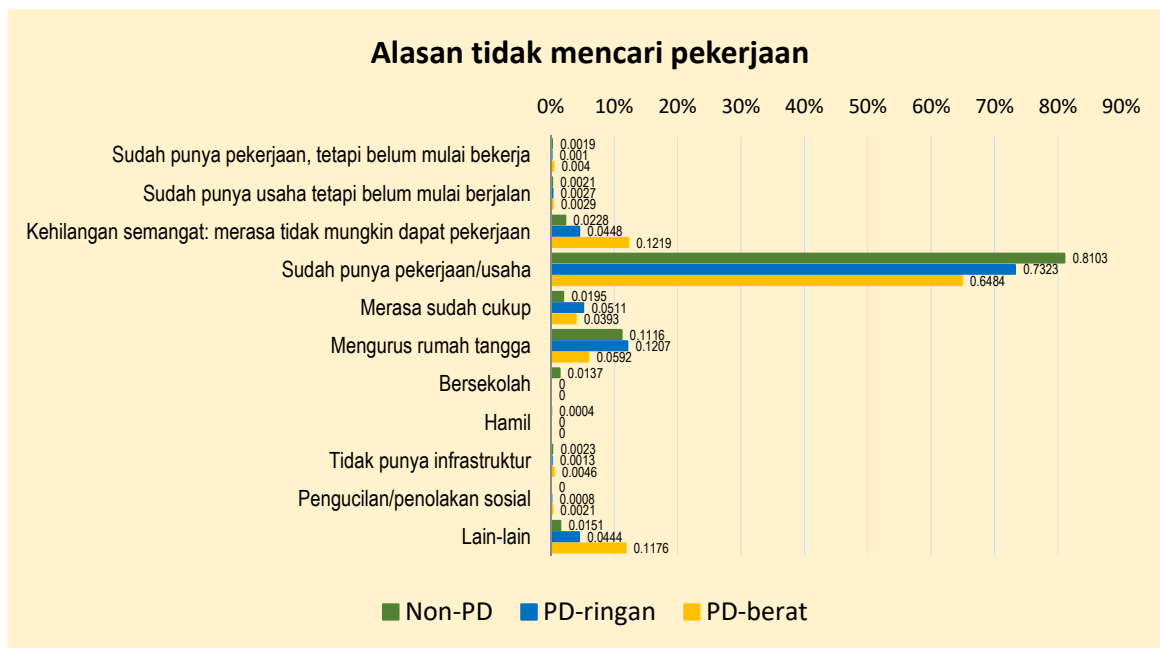
## 12. Lampiran 12: Upaya untuk Mendapat Pekerjaan



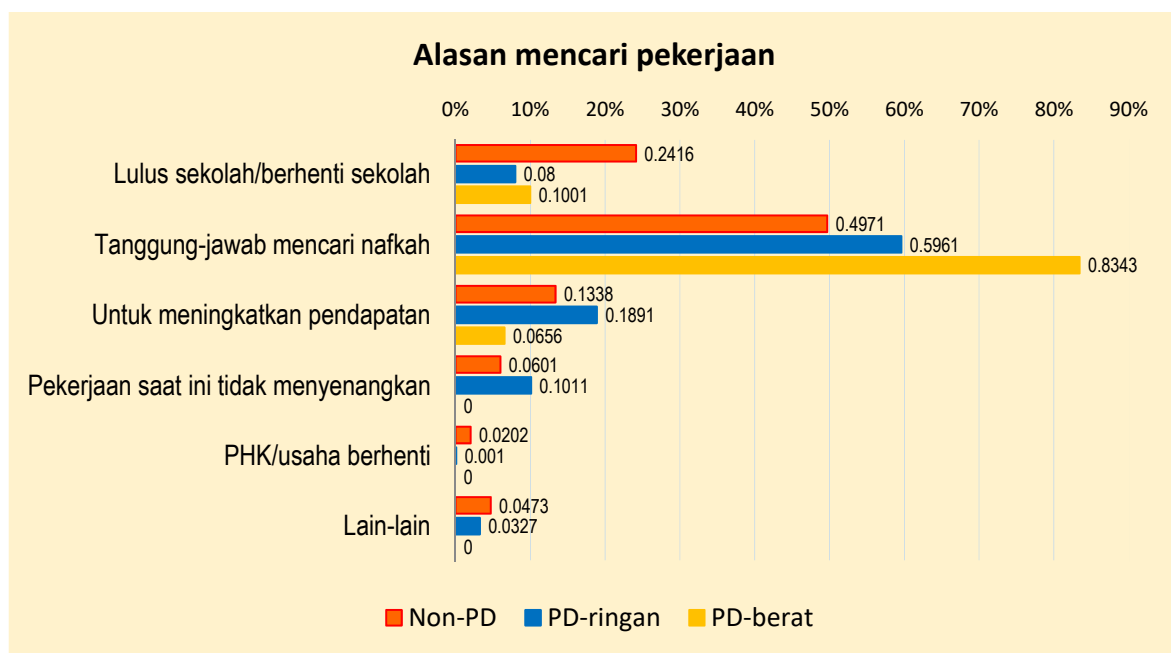
## 13. Lampiran 13: Kemauan Bekerja



## 14. Lampiran 14: Alasan Tidak Mencari Pekerjaan



## 15. Lampiran 15: Alasan Mencari Pekerjaan



## 16. Lampiran 16: Karakteristik Sosial dan Demografi PD di Angkatan Kerja

Kategori	Tidak Bekerja	Bekerja	NLP (Ibu Rumah Tangga & Pelajar)	NLP (Lain-lain)	Total	Angka Pengangguran	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
<b>Usia</b>							
Usia 15-25	6,45% 67.649	31,90% 334.406	51,89% 543.957	9,75% 102.195	100,00% 1.048.207	16,83%	38,36%
Usia 26-35	3,93% 51.467	54,41% 712.158	35,85% 469.267	5,81% 76.080	100,00% 1.308.972	6,74%	58,34%
Usia 36-45	2,47% 61.219	68,01% 1.683.742	26,04% 644.599	3,49% 86.314	100,00% 2.475.874	3,51%	70,48%
Usia 46-55	2,28% 108.575	71,06% 3.382.389	23,93% 1.138.913	2,73% 130.095	100,00% 4.759.972	3,11%	73,34%
Usia 56-65	1,52% 86.329	52,48% 2.990.338	38,18% 2.175.813	7,82% 445.786	100,00% 5.698.266	2,81%	53,99%
Usia >65	1,26% 94.502	27,72% 2.080.041	55,16% 4.139.329	15,86% 1.189.855	100,00% 7.503.727	4,35%	28,98%
<b>Lokasi</b>							
Perkotaan	2,51% 282.145	44,21% 4.970.456	42,99% 4.833.836	10,29% 1.156.429	100,00% 11.242.866	5,37%	46,72%
Perdesaan	1,62% 187.619	53,78% 6.213.113	37,03% 4.278.160	7,56% 873.896	100,00% 11.552.788	2,93%	55,40%
<b>Pendidikan</b>							
Tidak Pernah/Tidak Lulus Sekolah Dasar	1,89% 197.377	42,09% 4.389.193	45,83% 4.778.841	10,19% 1.062.237	100,00% 10.427.648	4,30%	43,98%
Sekolah Dasar	1,91% 114.713	54,04% 3.249.647	36,66% 2.204.778	7,40% 444.819	100,00% 6.013.957	3,41%	55,94%
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2,45% 59.425	48,56% 1.177.776	41,44% 1.005.034	7,55% 182.999	100,00% 2.425.234	4,80%	51,01%
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2,83% 80.098	57,63% 1.629.738	31,50% 890.753	8,05% 227.564	100,00% 2.828.153	4,68%	60,46%
Perguruan Tinggi	1,65% 18.151	66,98% 737.215	21,13% 232.590	10,24% 112.706	100,00% 1.100.662	2,40%	68,63%
<b>Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	2,49% 265.172	63,27% 6.724.582	22,08% 2.347.093	12,16% 1.291.939	100,00% 10.628.786	5,84%	85,72%
Perempuan	1,68% 204.592	36,65% 4.458.987	55,60% 6.764.903	6,07% 738.386	100,00% 12.166.868	5,35%	54,85%
<b>Status Pernikahan</b>							
Status Lain	2,65% 232.284	30,33% 2.659.929	54,98% 4.822.795	12,04% 1.056.262	100,00% 8.771.270	8,03%	32,97%
Menikah	1,69% 237.480	60,78% 8.523.640	30,58% 4.289.201	6,95% 974.063	100,00% 14.024.384	2,71%	62,47%

## 17. Lampiran 17: Karakteristik Sosial dan Demografi Non-PD di Angkatan Kerja

Kategori	Tidak Bekerja	Bekerja	NLP (Ibu Rumah Tangga & Pelajar)	NLP (Lain-lain)	Total	Angka Pengangguran	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
<b>Usia</b>							
Usia 15-25	8,63%	41,98%	47,52%	1,87%	100,00%	17,05%	50,61%
	4.055.584	19.730.980	22.334.633	880.894	47.002.091		
Usia 26-35	3,56%	73,41%	22,62%	0,41%	100,00%	4,63%	76,97%
	1.421.890	29.301.708	9.028.053	164.149	39.915.800		
Usia 36-45	1,54%	79,83%	18,34%	0,29%	100,00%	1,90%	81,37%
	546.624	28.287.672	6.498.218	102.638	35.435.152		
Usia 46-55	1,37%	81,08%	17,01%	0,54%	100,00%	1,66%	82,45%
	341.645	20.260.337	4.249.926	135.983	24.987.891		
Usia 56-65	1,07%	73,60%	22,00%	3,33%	100,00%	1,43%	74,67%
	135.239	9.313.391	2.784.318	421.675	12.654.623		
Usia >65	1,11%	53,44%	36,18%	9,28%	100,00%	2,04%	54,55%
	53.426	2.570.040	1.739.880	446.077	4.809.423		
<b>Lokasi</b>							
Perkotaan	4,54%	64,02%	29,93%	1,51%	100,00%	6,63%	68,57%
	4.128.716	58.163.139	27.186.980	1.370.641	90.849.476		
Perdesaan	3,28%	69,37%	26,30%	1,06%	100,00%	4,51%	72,65%
	2.425.692	51.300.989	19.448.048	780.775	73.955.504		
<b>Pendidikan</b>							
Tidak Pernah/Tidak Lulus Sekolah Dasar	2,17%	74,45%	21,58%	1,80%	100,00%	2,84%	76,62%
	454.334	15.564.692	4.510.880	377.322	20.907.228		
Sekolah Dasar	2,57%	68,15%	28,13%	1,15%	100,00%	3,64%	70,72%
	1.104.241	29.228.775	12.065.831	492.222	42.891.069		
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	3,25%	52,68%	42,84%	1,23%	100,00%	5,82%	55,93%
	1.254.390	20.303.499	16.510.623	474.844	38.543.356		
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	6,04%	67,38%	25,27%	1,31%	100,00%	8,22%	73,41%
	2.814.928	31.418.010	11.784.731	613.184	46.630.853		
Perguruan Tinggi	5,85%	81,79%	11,14%	1,22%	100,00%	6,68%	87,64%
	926.515	12.949.152	1.762.963	193.844	15.832.474		
<b>Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	5,01%	80,72%	12,36%	1,92%	100,00%	5,84%	85,72%
	4.155.981	66.992.188	10.258.301	1.590.675	82.997.145		
Perempuan	2,93%	51,92%	44,47%	0,69%	100,00%	5,35%	54,85%
	2.398.427	42.471.940	36.376.727	560.741	81.807.835		
<b>Status Pernikahan</b>							
Status Lain	8,64%	51,61%	37,45%	2,30%	100,00%	14,34%	60,25%
	4.848.851	28.971.566	21.022.076	1.290.816	56.133.309		
Menikah	1,57%	74,07%	23,57%	0,79%	100,00%	2,07%	75,64%
	1.705.557	80.492.562	25.612.952	860.600	108.671.671		

## 18. Lampiran 18: Karakteristik Sosial dan Demografi PD yang Dipekerjakan

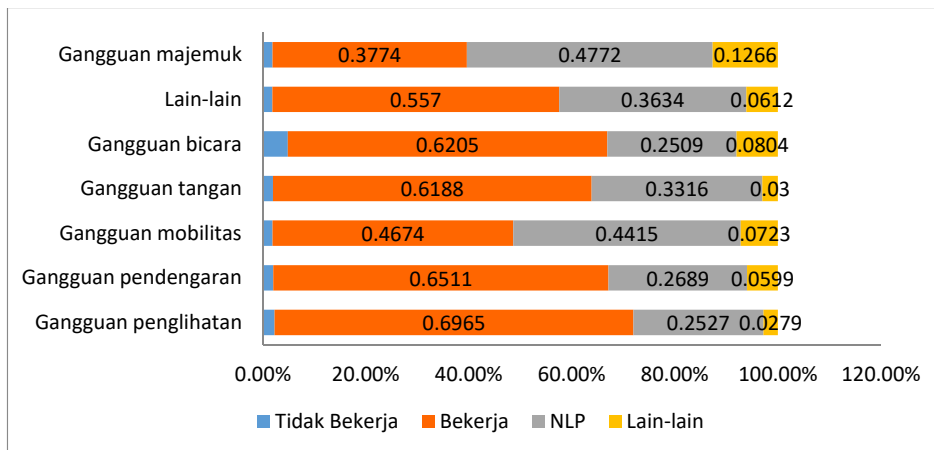
Karakteristik/ Kategori	Formal	Informal	Tidak Dibayar	Dibayar	Memiliki Pekerjaan Sampingan	Tidak Memiliki Pekerjaan Sampingan	Total yang Dipekerjakan
<b>Usia</b>							
Usia 15-25	48,68% 162.790	51,32% 171.616	36,80% 123.052	63,20% 211.354	6,78% 22.687	93,22% 311.719	100,00% 334.406
Usia 26-35	56,22% 400.353	43,78% 311.805	26,11% 185.979	73,89% 526.179	13,20% 94.020	86,80% 618.138	100,00% 712.158
Usia 36-45	44,64% 751.695	55,36% 932.047	35,61% 599.515	64,39% 1.084.227	18,87% 317.758	81,13% 1.365.984	100,00% 1.683.742
Usia 46-55	40,77% 1.378.988	59,23% 2.003.401	43,38% 1.467.326	56,62% 1.915.063	20,48% 692.753	79,52% 2.689.636	100,00% 3.382.389
Usia 56-65	26,68% 797.798	73,32% 2.192.540	54,61% 1.632.962	45,39% 1.357.376	19,78% 591.435	80,22% 2.398.903	100,00% 2.990.338
Usia >65	17,36% 361.124	82,64% 1.719.412	60,67% 1.262.343	39,33% 818.193	16,25% 338.010	83,75% 1.742.526	100,00% 2.080.536
<b>Lokasi</b>							
Perkotaan	49,65% 2.467.891	50,35% 2.502.565	34,06% 1.693.165	65,94% 3.277.291	11,96% 594.298	88,04% 4.376.158	100,00% 4.970.456
Perdesaan	22,29% 1.384.857	77,71% 4.828.256	57,59% 3.578.012	42,41% 2.635.101	23,54% 1.462.365	76,46% 4.750.748	100,00% 6.213.113
<b>Pendidikan</b>							
Tidak Pernah/Tidak Lulus Sekolah Dasar	18,10% 794.591	81,90% 3.594.602	55,33% 2.428.322	44,67% 1.960.871	19,86% 871.632	80,14% 3.517.561	100,00% 4.389.193
Sekolah Dasar	28,28% 919.122	71,72% 2.330.525	50,15% 1.629.699	49,85% 1.619.948	19,43% 631.355	80,57% 2.618.292	100,00% 3.249.647
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	40,96% 482.399	59,04% 695.377	45,57% 536.665	54,43% 641.111	16,91% 199.215	83,09% 978.561	100,00% 1.177.776
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	61,04% 994.863	38,96% 634.875	33,06% 538.859	66,94% 1.090.879	16,14% 263.031	83,86% 1.366.707	100,00% 1.629.738
Perguruan Tinggi	89,77% 661.773	10,23% 75.442	18,67% 137.632	81,33% 599.583	12,40% 91.430	87,60% 645.785	100,00% 737.215
<b>Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	37,32% 2.509.279	62,68% 4.215.303	45,02% 3.027.584	54,98% 3.696.998	22,04% 1.482.317	77,96% 5.242.265	100,00% 6.724.582
Perempuan	30,13% 1.343.469	69,87% 3.115.518	50,32% 2.243.593	49,68% 2.215.394	12,88% 574.346	87,12% 3.884.641	100,00% 4.458.987
<b>Status Pernikahan</b>							
Status Lain	28,97% 770.550	71,03% 1.889.379	37,35% 993.402	62,65% 1.666.527	11,81% 314.193	88,19% 2.345.736	100,00% 2.659.929
Menikah	36,16% 3.082.198	63,84% 5.441.442	50,19% 4.277.775	49,81% 4.245.865	20,44% 1.742.470	79,56% 6.781.170	100,00% 8.523.640

## 19. Lampiran 19: Karakteristik Sosial dan Demografi Non-PD yang Dipekerjakan

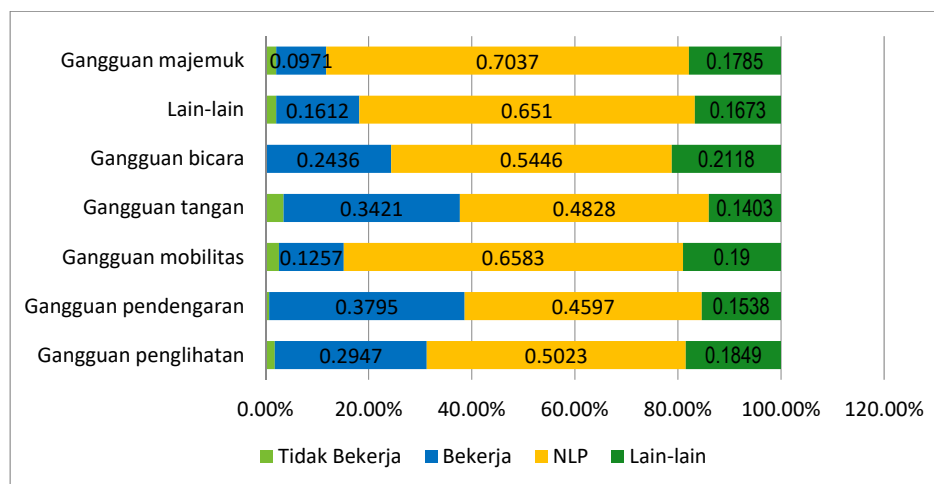
Karakteristik/ Kategori	Formal	Informal	Tidak Dibayar	Dibayar	Memiliki Pekerjaan Sampingan	Tidak Memiliki Pekerjaan Sampingan	Total yang Dipekerjakan
<b>Usia</b>							
Usia 15-25	60,05%	39,95%	27,49%	72,51%	7,41%	92,59%	100,00%
	11.847.577	7.883.403	5.423.973	14.307.007	1.462.793	18.268.187	19.730.980
Usia 26-35	57,54%	42,46%	26,52%	73,48%	13,56%	86,44%	100,00%
	16.859.663	12.442.045	7.771.358	21.530.350	3.971.897	25.329.811	29.301.708
Usia 36-45	50,45%	49,55%	34,05%	65,95%	18,17%	81,83%	100,00%
	14.270.123	14.017.549	9.632.079	18.655.593	5.139.775	23.147.897	28.287.672
Usia 46-55	44,32%	55,68%	40,37%	59,63%	19,71%	80,29%	100,00%
	8.979.358	11.280.979	8.178.369	12.081.968	3.994.199	16.266.138	20.260.337
Usia 56-65	32,37%	67,63%	51,93%	48,07%	21,23%	78,77%	100,00%
	3.014.989	6.298.402	4.836.055	4.477.336	1.977.559	7.335.832	9.313.391
Usia >65	21,56%	78,44%	59,93%	40,07%	20,01%	79,99%	100,00%
	554.026	2.016.014	1.540.308	1.029.732	514.201	2.055.839	2.570.040
<b>Lokasi</b>							
Perkotaan	65,56%	34,44%	22,46%	77,54%	9,52%	90,48%	100,00%
	38.133.269	20.029.870	13.062.020	45.101.119	5.535.270	52.627.869	58.163.139
Perdesaan	33,90%	66,10%	47,41%	52,59%	22,47%	77,53%	100,00%
	17.392.467	33.908.522	24.320.122	26.980.867	11.525.154	39.775.835	51.300.989
<b>Pendidikan</b>							
Tidak Pernah/Tidak Lulus Sekolah Dasar	41,21%	58,79%	51,17%	48,83%	21,65%	78,35%	100,00%
	8.418.665	12.011.050	7.964.331	7.600.361	3.369.343	12.195.349	15.564.692
Sekolah Dasar	32,77%	8,418,665	42,56%	57,44%	18,61%	81,39%	100,00%
	9.579.039	19.649.736	12.439.629	16.789.146	5.439.604	23.789.171	29.228.775
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	45,15%	54,85%	36,82%	63,18%	13,78%	86,22%	100,00%
	9.167.212	11.136.287	7.474.893	12.828.606	2.798.685	17.504.814	20.303.499
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	68,34%	31,66%	25,12%	74,88%	11,79%	88,21%	100,00%
	21.471.643	9.946.367	7.890.693	23.527.317	3.704.489	27.713.521	31.418.010
Perguruan Tinggi	90,77%	9,23%	12,45%	87,55%	13,50%	86,50%	100,00%
	11.754.200	1.194.952	1.612.596	11.336.556	1.748.303	11.200.849	12.949.152
<b>Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	37,32%	62,68%	45,02%	54,98%	22,04%	77,96%	100,00%
	2.509.279	4.215.303	3.027.584	3.696.998	1.482.317	5.242.265	6.724.582
Perempuan	30,13%	69,87%	50,32%	49,68%	12,88%	87,12%	100,00%
	1.343.469	3.115.518	2.243.593	2.215.394	574.346	3.884.641	4.458.987
<b>Status Pernikahan</b>							
Status Lain	57,74%	42,26%	25,30%	74,70%	9,24%	90,76%	100,00%
	16.728.447	12.243.119	7.329.217	21.642.349	2.677.629	26.293.937	28.971.566
Menikah	48,20%	51,80%	37,34%	62,66%	17,87%	82,13%	100,00%
	38.797.289	41.695.273	30.052.925	50.439.637	14.382.795	66.109.767	80.492.562



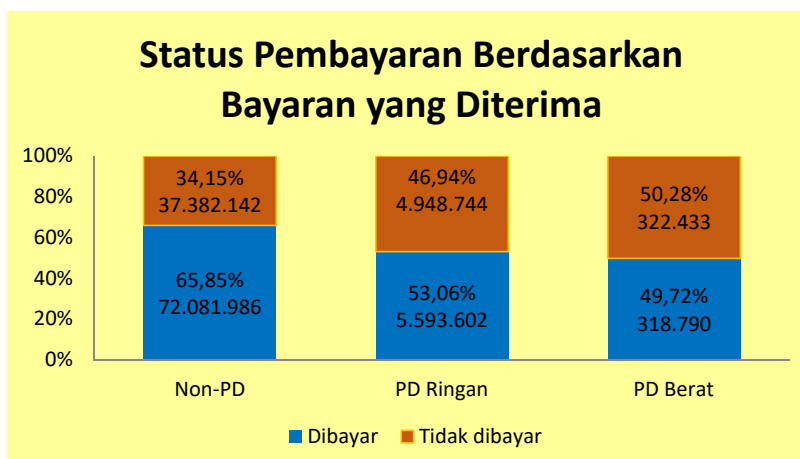
## 20. Lampiran 20: Status Berdasarkan Jenis Disabilitas PD dengan Disabilitas Ringan



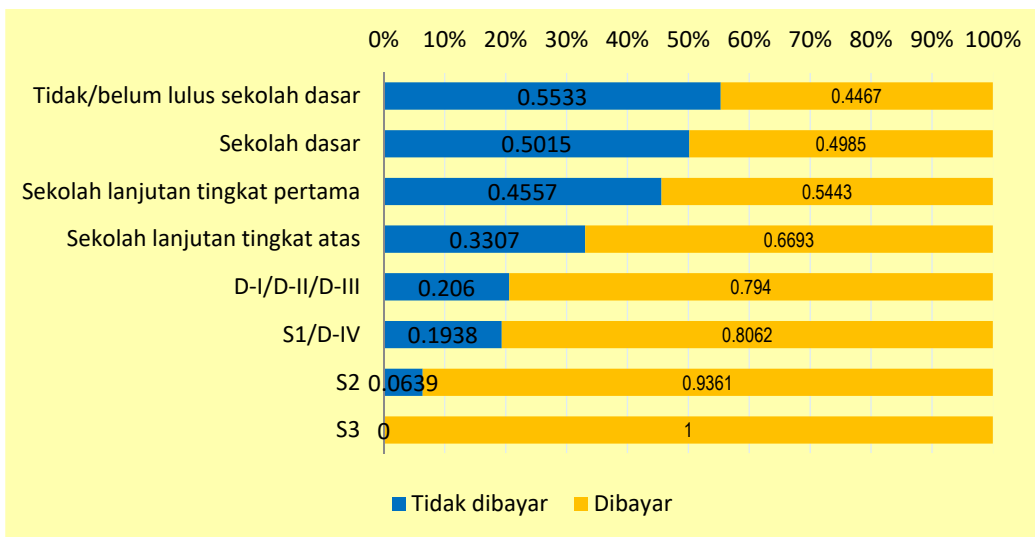
## 21. Lampiran 21: Status Berdasarkan Jenis Disabilitas PD dengan Disabilitas Berat



## 22. Lampiran 22: Status Pembayaran Berdasarkan Bayaran yang Diterima



## 23. Lampiran 23: Status Pembayaran Berdasarkan Pendidikan untuk PD



## 24. Lampiran 24: Metode Pembayaran

